

SKRIPSI

**Diplomasi Parlemen DPR RI Terkait Isu Papua Merdeka Dalam Forum
IndonesiaPasific Parliamentary Partmership (IPPP)**



DI SUSUN OLEH

ARFANA IBRAHIM

146420120035

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**DIPLOMASI PARLEMEN DPR RI TERKAIT ISU PAPUA MERDEKA DALAM
FORUM INDONESIA PASIFIC PARLIAMENTARY PARTMERSHIP (IPPP)**

Nama : Arfana Ibrahim

Nim : 146420120035

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Pada 29 Oktober 2024

Pembimbing I

Nurinayah, M.H.I

NIDN. 1417129501



(.....)

Pembimbing II

Etik Siswati Ningrum, M.H.I

NIDN. 1409018401



(.....)

**LEMBAR PENGESAHAN
DIPLOMASI PARLEMEN DPR RI TERKAIT ISU PAPUA MERDEKA DALAM
FORUM INDONESIA PASIFIC PARLIAMENTARY PARTMERSHIP (IPPP)**

Nama : Arfana Ibrahim

Nim : 146420120035

Skripsi Ini Telah Disahkan Oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong



Pada 29 Oct 2024

Dekan **ABSHOL**

Agustina Cindra Pamungkas, M.H.I.

NIDN. 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. Etik Siswati Ningrum, M.H.I.

NIDN. 1409018401


(.....)

2. Try Danuwijaya, M.H.I.

NIDN. 1407129201


(.....)

3. Nurinayah, M.H.I.

NIDN. 1417129501


(.....)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuh dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 29 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Arfana Ibrahim

NIM. 146420120035

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

QS. Surat Yusuf ayat 87

PERSEMBAHAN

- Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kemudahan serta menuntun penulis melalui berbagai tantangan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Kedua orang tua, ayahanda Ibrahim Mahmud dan ibunda tercinta Nurlia A. Majid penulis mengucapkan rasa syukur yang tak henti-hentinya karena telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menjalankan Study di Unimuda Sorong
- Kanda Dr. Bustamin. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah membimbing penulis dalam menempuh study dari dari awal hingga saat ini.
- Dosen Pembimbing Ibu Nurinaya, M.H.I, Ibu Etik Siswati Ningrum, M.H.I, dan bapak Try Danuwijaya. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
- Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Terkhususnya Prodi Hubungan Internasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, terima kasih karena telah menjadi rumah bagi penulis dalam menyelesaikan study.
- Dan yang terahir penulis persembahkan kepada seluruh teman-teman, kerabat dan seluruh keluarga yang telah mendukung setiap langkah dan memberikan semangat bagi penulis. Semoga apa yang telah menulis dapatkan sekarang ini kelak dapat bermanfaat bagi banyak orang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Tinjauan Pustaka	4
1.5. Kerangka Dasar Pemikiran.	8
1.5.1. Teori Rezim Internasional.....	9
1.5.2. Konsep Multi Track Diplomasi.....	12
1.6. Metode Penelitian	15
1.6.1. Jenis penelitian	15
1.6.2. teknik pengumpulan data	15
1.6.3. Teknik Analisis Data.....	15
1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
1.7. Hipotesis	17
1.8. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN	19

2.1. GEOPOLITIK DI KAWASAN PASIFIK SELATAN.....	19
2.1.1. Wilayah Kepulauan Pasifik.....	19
2.1.2. Budaya dan suku di Kepulauan Pasifik.....	21
2.1.3. Sistem Politik Negara-Negara di Kepulauan Pasifik dan Permasalahannya.....	23
2.2. INDONESIA PACIFIC PARLIAMENTARY PARTNERSHIP (IPPP).....	26
2.3. KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERKAT ISU	
PAPUA.....	27
2.3.1. Dinamikan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Pasifik Selatan.....	28
2.3.2. Isu Papua di Kancah Politik Global.....	30
2.3.3. Indonesia dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).....	32
2.3.4. Pendekatan Bilateral Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan.....	33
BAB III	36
DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA NEGARA-NEGARA DI KAWASAN	
KEPULAUAN PASIFIK.....	36
3.1. DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DALAM FORUM INDONESIA	
PACIFIC PARLIAMENTARY PARTNERSHIP (IPPP)	36
3.1.1. Membangun Kemitraan untuk Pembangunan Masa Depan Kawasan Pasifik.....	40
3.1.2. Mempromosikan Potensi Ekonomi Biru dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan.....	42
3.1.3. Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dalam Kemitraan Indonesia-Pasifik.....	43
3.2. STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA DI	
KAWASAN PASIFIK SELATAN.....	45
3.2.1. Manajemen Berita.....	45
3.2.2. Strategi Komunikasi.....	47
3.2.3. Membangun Relasi.....	48
3.2.4. Bali Demokrasi Forum.....	48
3.2.5. Melanesian Cultur Festival.....	51
3.2.6. Pemberian Beasiswa.....	53
3.2.7. Pemberian Bantuan Moneter.....	56
3.3. LANGKAH-LANGKAH KONKRET YANG DI LAKUKAN OLEH	
PARLEMEN INDONESIA	58
3.3.1. Manfaat dari Diplomasi Parlemen.....	60
3.3.2. Tujuan Diplomasi Parlemen Indonesia Terhadap Negara Kawasan Asia Pasifik Selatan.....	62
BAB VI	64
4.1. Kesimpulan.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

Lampiran.....	71
----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.5.1 Skema Mekanisme Epektifitas Rezim	11
Gambar 1.5.2 Multi Track Diplomacy	13
Gambar 2.1.1 Peta Kepulauan Pasifik	20
Gambar 2.2.1 Potret Sebaran Ras Di Kepulauan Pasifik	22

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1 : Rekapitulasi Data Dari Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.....	49
Tabel 3.2.2 : Rekapitulasi Data Penerima Beasiswa Dari Indonesia	53
Tabel 3.2.3 : Data Negara Penerima Bantuan Dari Indonesia.....	57

DAFTAR ISTILAH

Indonesia AID merupakan program bantuan luar negeri Indonesia yang rencananya akan menyisihkan dana dalam dana abadi yang akan didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) merupakan forum Parlemen Negara-negara Asean

Asian Pacific Parliament Forum (APPF), merupakan forum parlemen asia pasifik yang membahas tentang isu regional dan global

Asian Parliamentary Assembly (APA), adalah organisasi parlemen Internasional yang menekankan pada perkembangan lingkungan strategis

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) adalah badan yang mengurus kerjasama dan Diplomasi DPR RI

Bali Democracy Forum (BDF) merupakan Forum Negara-negara demokrasi yang diadakan setuap tahun di bali dengan tujuan sharing dan bertukar pengalaman terkait demokrasi Negara-negara anggota.

Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) merupakan program bantuan beasiswa yang diberikan oleh Negara Indonesia kepada Negara-negara di Kepulauan Pasifik

DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Hak Azazi Manusia (HAM) merupakan hak dasar manusia yang harus di penuhi oleh setuap unsur

Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) merupakan forum kerja sama Indonesia dengan Negara-negara di kawasan Pasifik

Inter- Parliament Union (IPU), adalah organisasi parlemen internasional yang membidangi negosiasi politik antar-Negara

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) adalah perwakilan Negara Indonesia di suatu Negara dan juga penanda hubungan diplomatic antara Indonesia dengan Negara sahabat

KNB merupakan singkatan dari Kemitraan Negara Berkembang

KSST Kerjasama Selatan-selatan Triangular

LSM Lembaga Suadaya Masyarakat

Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah organisasi Internasional yang terdiri dari 4 negara melanesia yaitu Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, dan Kepulauan Salomon dengan tujuan untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerja sama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance dan keamanan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk Negara Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1.

Non Government Organisation (NGO) adalah lembaga suadaya yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperoleh keuntungan dari kegiatannya

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah kelompok separatis papua yang ingin memisahkan diri dari Negara Indonesia

Parliamentary Union of the OIC Members (PUIC) adalah sebuah organisasi Internasional yang terdiri dari parlemen Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan lembaga internasional yang dinaungin oleh seluruh Negara Di dunia

PIF Pacific Island Forum

SDA Sumber Daya Alam

SDM Sumber Daya Manusia

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen Global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan mencakup 17 tujuan dan sasaran Global tahun 2030

ABSTRAK

Sebagai negara kepulauan terbesar di jantung Pasifik dan terletak di antara dua samudera, Indonesia terus menjalin kerja sama yang baik dengan negara-negara Pasifik untuk menjamin kawasan yang aman, terbuka, maju, dan sejahtera. Indonesia telah lama menjalin hubungan positif dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan meyakini perlunya peningkatan lebih lanjut dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, serta kemitraan sosial budaya. Dalam memperkuat kerja sama kawasan pasifik selatan, Negara Indonesia menginisiasi sebuah kerjasama parlemen antara Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Pasifik selatan yang di sebut *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP). Fokus utama Indonesia dalam menjalankan kebijakan yang berorientasi di kawasan pasifik tersebut antara lain: (1) Membangun kesadaran Negara-negara Pasifik Selatan terkait dengan status Papua dan keseriusan pemerintah dalam membangun papua. (2) Penguatan Kerjasama Mritim (3) Mengupayakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) serta (4) memperkuat Konektifitas Regional. Oleh sebab itu, tujuan dari IPPP ini merupakan sebuah langkah diplomasi jangka panjang dalam membangun kerjasama, komunikasi, serta kesepahaman antara DPR RI dengan parlemen Negara-Negara Kepulauan Pasifik, terkait pentingnya mewujudkan kemajuan bersama yang berlandaskan pada penghormatan dan kedaulatan wilayah masing-masing. Dengan menggunakan landasan teori Rezim Internasional dan konsep diplomasi parlemen sebagai pisau analisi, penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana diplomasi Parlemen DPR RI Terkait Isu Papua Merdeka Dalam Forum *Indonesia Pasific Parliamentary Partmership* (IPPP). Selai itu, penelitian ini di lakukan dalam rentan waktu 2018-2023

Kata Konci: Diplomasi, Parlemen, Kepulauan Pasifik, Kerja Sama, Isu Papua Merdeka.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Papua merupakan wilayah yang terletak di Indonesia bagian timur. Wilayah ini memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, kekayaan alam yang di wilayah ini juga memberikan pemasukan yang besar bagi Negara. Oleh sebab itu, tugas pemerintah Indonesia adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat Papua secara keseluruhan, dan pihak-pihak yang mendukung isu Papua pada khususnya. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia menjadi hal yang penting untuk mempertahankan kedaulatan wilayah. Selain pendekatan terhadap masyarakat Papua, penting kiranya Negara Indonesia juga harus mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua.

Dukungan Internasional diperlukan untuk mencapai tujuan kemerdekaan Papua, yaitu ingin memisahkan diri dari Indonesia. Tuntutan politik merdeka yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut di beri label oleh pemerintah Indonesia sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Oleh sebab itu, untuk mencegah gerakan yang dilakukan oleh OPM tersebut, Indonesia harus melakukan diplomasi terhadap Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sebagai upaya untuk menekan dukungan terhadap Isu Papua Merdeka.

Pendekatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia salah satunya adalah Diplomasi Parlemen dengan sasaran utama yaitu Negara-negara Kawasan Pasifik Selatan. Di Indonesia, DPR RI memiliki hak untuk melakukan diplomasi parlemen melalui alat kelengkapan dewan yaitu Komisi I DPR RI selaku komisi yang membidangi urusan luar negeri serta Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Yang menerangkan bahwa penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri terdiri dari Pemerintah dan non Pemerintah dalam hal ini DPR termasuk didalamnya sebagaimana penjeleasan pasal tersebut.

Sebagai negara kepulauan terbesar di jantung Pasifik dan terletak di antara dua samudera, Indonesia terus menjalin kerja sama yang baik dengan negara-negara Pasifik untuk menjamin kawasan yang aman, terbuka, maju, dan sejahtera. Indonesia telah lama menjalin hubungan positif dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan meyakini perlunya peningkatan lebih lanjut dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, serta kemitraan sosial budaya.

Terlepas dari semua peluang pembangunan, Indonesia memiliki tantangan geografis yang sama dengan negara kepulauan di Pasifik. Sumber daya laut yang melimpah yang kita miliki saat ini masih menjadi tantangan dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Pada saat yang sama, kapasitas sumber daya manusia kita memerlukan peningkatan, serta intervensi kebijakan agar dapat memberikan manfaat bagi negara-negara di kawasan (BKSAP, 2018)

Dalam hal aliansi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antara Indonesia dan Pasifik, parlemen memainkan peran penting untuk berkontribusi dalam mengembangkan hubungan persahabatan serta dialog dan kerja sama yang saling menguntungkan. Anggota Parlemen mempunyai posisi yang strategis untuk bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga-lembaga negara, serta untuk mendorong dan mengadopsi kebijakan dan perundang-undangan yang berpusat pada masyarakat untuk memastikan tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan (BKSAP, 2018)

Dalam memperkuat kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara di kawasan pasifik selatan, Negara Indonesia melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginisiasi sebuah kerjasama parlemen antara Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Pasifik selatan yang di sebut *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) yang di selenggarakan pertamakali di Jakarta pada 24-25 Juli 2018.

Penyelenggaraan IPPP tersebut adalah dalam rangka untuk memberikan dukungan dan penguatan terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia di kawasan Pasifik yang di kenal dengan sebutan "Indo-Pacific Outlook " yang dapat di

makna dalam sebuah cara pandang Negara-Negara di Asia Tenggara. Fokus utama Indonesia dalam menjalankan kebijakan yang berorientasi di kawasan pasifik tersebut antara lain: (1) Membangun kesadaran Negara-negara Pasifik Selatan terkait dengan status Papua dan keseriusan pemerintah dalam membangun papua. Hal ini dikarenakan selama ini Negara-negara di kawasan pasifik selatan melihat bahwa pemerintah indonesia tidak serius dalam menuntaskan berbagai permasalahan di papua dan hanya mengambil keuntungan dari sumberdaya alam papua. (2) Penguatan Kerjasama Mritim (3) Mengupayakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) serta (4) memperkuat Konektifitas Regional.

Selain keempat poin utama tersebut, pemerintah juga menyadari bahwa di masa yang akan datang, kedaulatan Indonesia akan sedikit banyak di pengaruhi oleh dinamika Geopolitik di kawsan Pasifik.

Oleh sebab itu, tujuan dari IPPP ini merupakan sebuah langkah diplomasi jangka panjang dalam membangun kerjasama, komunikasi, serta kesepahaman antara DPR RI dengan parlemen Negara-Negara Kepulauan Pasifik, terkait pentingnya mewujudkan kemajuan bersama yang berlandaskan pada penghormatan dan kedaulatan wilayah masing-masing.

Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana diplomasi Parlemen DPR RI Terkait Isu Papua Merdeka Dalam Forum *Indonesia Pasific Parliamentary Partmership* (IPPP). Selai itu, penelitian ini di lakukan dalam rentan waktu 2018-2023 karena pada tahun ini bertepatan dengan sidang pertama *Indonesia Pasifik Parliamentay Partnership* (PPP) ke satu.

Dalam periode ini juga BKSAP DPR RI mulai aktif mempublikasi data-data yang berkaitan dengan diplomasi parlemen di situs www.dpr.go.id dan media sosial lainnya sehingga mempermudah penulis dalam mencari data dalam penulisan proposal ini.

1.2. Rumusan Masalah.

Sebagai Negara Maritim yang letaknya sangat strategis diantara di Kawasan Asia Pasifik, Indonesia harus memainkan peran serta letak geografis yang dimiliki untuk menjaga kestabilan serta memperkuat kerja sama dengan Negara-Negara terutama di kepulauan pasifik. Mengingat kawasan ini memiliki potensi kerjasama politik dan ekonomi yang sangat potensial, Indonesia perlu mengusung peran diplomasi parlemen agar menjaga integrasi serta kedaulatan Negara.

Atas dasar inilah timbul pertanyaan **“Bagaimana Diplomasi Parlemen DPR RI Terkait Isu Papua Merdeka Dalam *Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)*”?**

1.3. Tujuan Penelitian.

- a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Parlemen terkait isu Papua merdeka dalam Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)
- b. Mengetahui sejauh mana diplomasi yang telah dilakukan oleh parlemen DPR RI terkait isu Papua merdeka dalam forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)

1.4. Tinjauan Pustaka.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi dan sumber lain sebagai tinjauan mengenai topik yang penulis bahas dalam penulisan ini. Terdapat beberapa sumber serta kajian literatur yang membahas tentang diplomasi parlemen. Akan tetapi, dari setiap kajian memiliki perspektif serta fokus kajian yang berbeda. Fokus utama dalam penulisan ini adalah pada **Bagaimana Peran Diplomasi Parlemen DPR RI terkait isu papua merdeka dalam forum indonesia pacific parliamentary partnership (IPPP)**

Pertama, penulis menggunakan jurnal yang ditulis oleh Yesica Putri Prisilia Angeli, fernando J. M. M. Karisho, dan Stevan O. Voges berjudul

Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Vanuatu Terkait Dengan Pernyataan Vanuatu Mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 2022. Jurnal ini menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. Yuridis Normatif adalah metode penelititan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya (Yesica Putri Prisilia dkk 2022).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang bertujuan agar penulis dapat memperoleh informasi yang relevan dengan judul yang dibahas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa: Yang pertama, hubungan diplomatik dalam bentuk kerja sama bilateral antara dua negara yaitu Indonesia dan Vanuatu, serta kerja sama kawasan regional yakni dalam bentuk pelaksanaan KTT Asia Africa dan kerja sama teknik dengan Melanesia Spearhead Group (Yesica Putri Prisilia dkk 2022)

Hubungan kerja sama ini melahirkan pembukaan kedutaan besar Indonesia untuk Vanuatu yang berlokasi di Canberra, Australia. Kedua, berdasarkan prinsip diplomasi yang dimiliki Indonesia, yakni diplomasi yang memiliki ketegasan dan kegigihan namun luwes dan rasional dalam pendekatan, serta diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian diantara Negara yang menjauhi sikap konfrontasi atau politik kekerasan, menyambung penyelesaian berbagai konflik dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam jurnal diatas dengan penelitian ini yaitu pada fokus utama penelitiannya. Dalam jurnal tersebut mengkaji tentang hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vanuatu di tengah konflik papua barat yang berarti bahwa jurnal ini hanya memfokuskan pada hubungan bilateral antara kedua negara. Sedangkan yang peneliti ajukan dalam proposal skripsi ini terkait adalah terkait dengan diplomasi parlemen terkait isu papua merdeka dalam forum IPPP.

Selain itu terdapat perbedaan pada aktor yang dikaji dalam jurnal tersebut di atas dengan proposal penelitian ini, jurnal tersebut mengkaji tentang bagaimana aktor pemerintah Indonesia dan pemerintah Vanuatu melakukan diplomasi untuk mencapai kesepakatan dan kerja sama yang saling menguntungkan kedua negara, hal ini berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini karena aktor utamanya adalah parlemen sehingga proses diplomasi dan ratifikasi kebijakannya pun berbeda.

Yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sutomo, Ahmad G. Dohamid dan Fauzia Gustarina Cempaka Timur yang berjudul **Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Pembungkaman Informasi Isu Papua Merdeka Tahun 2021**. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pembungkaman isu Papua yang terjadi pada tahun 2021.

Jurnal ini mengungkapkan bahwa pembungkaman informasi isu Papua dilakukan oleh kelompok pendukung Papua dengan tujuan propaganda dan mempengaruhi persepsi masyarakat dan dunia internasional termasuk dalam bentuk perang psikologi (M Sutomo dkk, 2021). Berdasarkan data hasil penelitian yang didapatkan dari informasi yang diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi khususnya internet semakin memudahkan penyebaran informasi hoax yang dapat mengancam disintegritas bangsa di Papua.

Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah pada strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi isu Papua, strategi yang dilakukan beberapa unsur pemerintah dalam mencegah terjadinya disintegritas bangsa yang disebabkan oleh penyebaran informasi hoax serta informasi negatif lainnya di Papua menggunakan strategi counter opini, pemutusan akses dan melakukan pendekatan kesejahteraan dalam pendidikan kepada masyarakat Papua.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam aktor diplomasi luar negeri terkait isu Papua. Negara Indonesia menggunakan aktor pemerintah dalam strategi

diplomasi luar negeri guna menghadapi tuntutan dari Vanuatu dan negara lainnya yang ingin mengangkat isu papua ke dalam sidang PBB (M Sutomo dkk, 2021).

Yang ketiga, jurnal yang ditulis M. Jullyo Bagus Firdaus dan Megahnanda Alidyan Kresnawati berjudul *Indonesia Parliamentary Diplomacy: The Leadership of House Representative Republik of Indonesia in ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2011-2012* yang terbit tahun 2021. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kerangka pemikiran diplomasi parlemen dan diplomasi total. Dalam jurnal tersebut, peneliti berfokus mengkaji kepemimpinan dalam lembaga parlemen regional AIPA untuk mewujudkan kepentingan regional dan nasional Indonesia.

Dalam bagian pembahasan, jurnal tersebut menjelaskan bahwa DPR RI memiliki peran untuk mendukung diplomasi Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah. Kepentingan DPR RI dalam AIPA tahun 2011-2012 telah mendorong Indonesia untuk meletakkan tiga prioritas AIPA yaitu memajukan upaya regional melalui komunitas ASEAN, menjaga ketertiban dan kawasan yang stabil dalam upaya pembangunan dan membahas visi ASEAN 2015 berdasarkan komunitas masyarakat ASEAN.

Selain itu kepemimpinan DPR RI dalam AIPA 2011-2012 juga ditujukan untuk menghadapi sengketa laut Cina selatan yang sedang bergejolak. Ketua DPR RI yang sekaligus Presiden AIPA saat itu mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui negosiasi dan cara damai melalui *Asean Political Security Community* (M. Jullyo Dkk, 2021)

Perbedaan jurnal diatas dengan proposal penelitian ini yaitu pada fokus utama Peran DPR RI dalam menjaga kemitraan Indonesia dengan Negara-Negara di Pasifik Selatan tahun 2018. Penelitian ini juga menggunakan kerangka pemikiran kebijakan luar negeri sebagai landasan DPR RI untuk membantu pemerintah menjalankan politik luar negeri indonesia melalui diplomasi di tingkat parlemen.

Berdasarkan beberapa rujukan jurnal diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan jurnal-jurnal tersebut. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji peran DPR RI dalam menjaga kemitraan Indonesia dengan negara-negara di pasifik selatan tahun 2018. Implementasi diplomasi DPR RI dilandasi oleh amanat konstitusi dan upaya melakukan kebijakan luar negeri yang berbasis pada kepentingan nasional dan kepentingan bersama.

Maka dari itu, untuk membedakan dengan penelitian lain, peneliti memberikan proposal ini dengan judul “ **Diplomasi Parlemen DPR RI Terkait Isu Papua Merdeka Dalam Forum Indonesia Pasific Parliamentary Partmership (IPPP)** ”

1.5. Kerangka Dasar Pemikiran.

Dalam studi ilmu sosial dan politik, terutama Hubungan Internasional teori merupakan sebuah alat analisa dengan tujuan melihat apa yang terjadi. Teori merupakan bentuk paling umum dala memberitahukan mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diharapkan terjadi, teori juga menjadi dasar prediksi teori menggabungkan seperangkat konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan.

Teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melihat” atau “memperlihatkan”. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi (Mohtar Mas`oed, 1990).

Dalam upaya menjawab rumusan masalah dan menarik argumen pokok, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan kasus yang sedang di bahas, yaitu Rezim Internasional dan konsep Multi Track Diplomasi. Gambaran tentang pendekatan-pendekatan tersebut akan diuraikan dan dielaborasi dengan studi kasus sebagai berikut.

1.5.1. Teori Rezim Internasional

Rezim Internasional dapat dipahami sebagai bentuk-bentuk Institusionalisasi perilaku yang di dasarkan pada norma ataupun aturan dengan maksud untuk mengelolah masalah-masalah yang saling memiliki ketergantungan di berbagai bidang dalam hubungan internasional.

Teori rezim Internasional mengacu pada sarana atau upaya terkait regulasi yang melintasi batas-batas territorial suatu Negara. Menurut Stephen D. Krasner, rezim Internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip-prinsip, norma, aturan proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional.

Oran R Young berpendapat bahwa rezim Internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuat keputusan dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan mengelola interaksi-interaksi mereka. Selain itu Young juga mengemukakan bahwa rezim regional merupakan rezim penyusun konteks yang lebih besar yang keberadaannya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konstalasi politik, keamanan, dan ekonomi sosial yang berkembang (Marie Claude Smouth, 2001).

Ernst B. Haas rezim adalah sebuah penyusunan, dimana para anggotanya terlihat mengatasi dan memainkan konflik kepentingan antara mereka sendiri, karena mereka menyadari bahwa kompleksitas dan saling ketergantungan membuat jalannya permainan lebih beresiko. Selain itu, pembelajaran dari rezim-rezim adalah sebuah jalan untuk memahami *homo politicus* dengan masa depan dan budaya. Dalam teori rezim terdapat sebuah perspektif atau pendekatan konsep rezim mainstream yang berada diantara liberalisme dan merkantilisme. Penganut aliran ini membatasi prediksi mereka ke pemahaman itu sendiri.

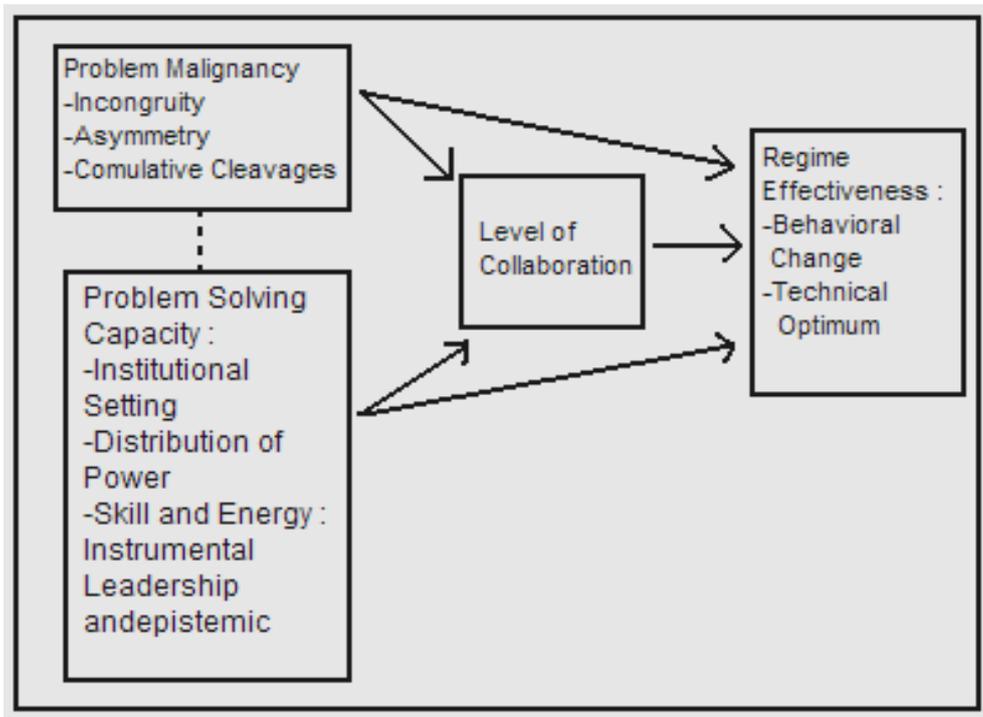
Proses yang menarik mereka adalah interaksi antara nilai-nilai tatanan yang diambil dari liberalisme dan merkantilisme. Rezim menurut aliran ini

merupakan pengaturan untuk mengurangi sebab-sebab yang tidak pasti seperti pembangunan untuk memaksimalkan penerimaan keuntungan aktor dan meminimalkan biaya meskipun ada perubahan kondisi. Tujuan utama dari rezim ini adalah untuk menetapkan dan membagi informasi agar memungkinkan aktor-aktornya mengurangi ketidakpastian (Marie Claude Smouth 2001).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas rezim berkaitan dengan *power of distribution* serta *grand regulation* yang selama ini berjalan. Jika permasalahan Internasional yang berkembang semakin lama semakin kompleks maka rezim Internasional atau dalam negeri harus dapat menyesuaikan dengan menyertakan sumber daya yang ada agar dapat mengimbangi persoalan yang terjadi. Jika tidak, maka penanganan masalah tidak akan menjadi sebuah *trouble shooter* yang efektif (Oran R. Young and Marc A. Levy, 1999)

Pendekatan utama dalam menjembatani efektifitas kinerja organisasi Internasional adalah teori efektifitas rezim menurut Arild Underdal, yang menyatakan bahwa efektifitas dari program internasional ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu pemerintah yang dalam hal ini memiliki serta menentukan aspek sasaran, hasil dan kendali dan institusi eksternal yang memiliki aspek yang memiliki peranan untuk mempengaruhi rezim. Underdal juga menyatakan arti pentingnya sebuah umpan balik (*feed back*) sebagai bagian dari solusi pemecahan masalah.

Gambaran utama teori ini, mekanismenya adalah dapat diaplikasikan melalui model inti efektifitas rezim sebagai berikut.



gambar 1.5.1 Skema mekanisme efektifitas Rezim

Fariabel pertama berisi tentang problermatika kronis yang tidak dapat di kesampingkan (*Problem Malignancy*), yang berisi beberapa sub-fariabel yaitu tentang aspek ketidakpastian (*Incongruity*), ketidaksimetrisan (*asymmetry*) dan total perpecahan (*Commulative cleavages*). Ketiga sub-variabel tersebut bersama-sama dengan variabel kapasitas masalah (*problem solving capacity*) yang terdiri dari sub-variabel seting institusional (*institutional setting*), distribusi kekuasaan (*distribution of power*) dan (*skill and energy*) yang terdiri dari instrumen, kepemimpinan dan pengetahuan, kemudian membentuk tingkatan kolaborasi (*level of collaboration*) untuk menuju efektifitas rezim yang menekankan pada perubahan tingkah laku (*behavioral change*) dan optimalisasi Teknik (*technical optimum*)

Dengan demikian teori rezim dalam penelitian ini digunakan untuk mengakomodasi bahwa peran dan kinerja aktor organisasi internasional ternyata tidak sepenuhnya dapat berjalan secara efektif. Persoalan ini disebabkan oleh dua hal yaitu berkaitan dengan faktor kedalam yang disebut dengan kapasitas

penyelesaian masalah (*problem solving capacity*) dan faktor keluar atau kronisitas persoalan politik-keamanan yang terjadi (*problem malignancy*).

Problem solving capacity menjadi bagian penting dalam menghambat kinerja rezim karena memang sumber daya manusia, kebijakan hingga pelaratan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari rezim organisasi internasional untuk mempengaruhi ataupun memobilisasi/menggerakkan negara-negara anggotanya.

1.5.2. Konsep Multi Track Diplomasi

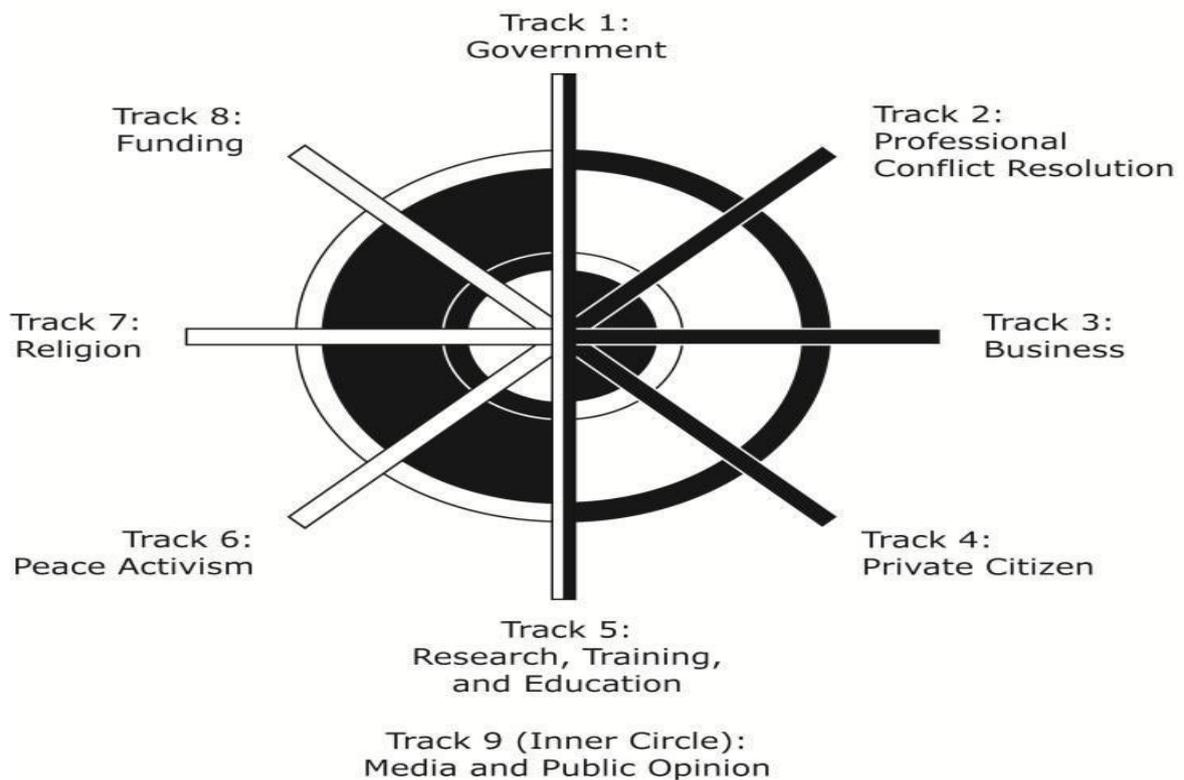
Diplomasi secara umum merupakan sebuah upaya yang memiliki fungsi sebagai Representasi, yakni mewakili negara asalnya untuk melakukan perundingan ataupun sebagainya untuk mensukseskan kepentingan negara asal. Dimana didalamnya terdapat negosiasi dengan negara lain berkaitan dengan masalah yang terjadi di negara asal. Juga terdapat asas melindungi kepentingan politik dan kepentingan masyarakat dari negara asal (Orman Dan Howard C Parkins, 1957).

Diplomasi Multitrack atau dikenal dengan diplomasi multipilar merupakan salah satu metode diplomasi yang melibatkan banyak aktor. Bukan hanya agen pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil serta para profesional yang terintegrasi dalam usaha usaha pemerintah dalam memberikan pelayanan diplomasi (Emila, Ranny, 2013)

Menurut Institute of Multi-Track Diplomacy (IMTD) mendefinisikan bahwa Multitrack Diplomacy adalah sebuah cara konseptual yang digunakan untuk melihat proses perdamaian internasional sebagai sistem yang hidup. Terlihat dalam jejaring kegiatannya yang saling berhubungan, individu, lembaga, komunitas yang dijalankan bersama demi tujuan bersama yakni sebuah dunia yang damai.

Diperluas melalui dua paradigma yakni; Track One merupakan pola diplomasi resmi pemerintah, komunikasi dan interaksi melalui pemerintah

secara langsung dan terjadi antar pemerintah. Track Two menjadi pola yang sebaliknya, dimana interaksi yang terlibat cenderung tidak terlihat resmi dan banyak terjadinya intervensi aktor non-negara.



gambar 1.5.2 Multi Track Diplomacy

pemerintahan.

Track kedua merupakan tindakan non-pemerintah di bidang professional bekerja bersama pemerintah, namun dipandang sebagai bagian yang terpisah dari mekanisme yang telah diciptakan oleh pemerintah-pemerintah negara. Bidang professional mencakup staf ahli departemen pemerintah serta badan-badan swasta yang dipercaya dapat menganalisis, mencegah, menyelesaikan, dan mengelola konflik internasional

Bidang bisnis secara aktual dan berpotensi pada pembangunan perdamaian melalui penyediaan peluang ekonomi, international friendship and understanding, dan saluran komunikasi yang informal.

Track ketiga ini berfungsi sebagai pembantu pemerintah dalam menanggulangi isu-isu domestik yang telah diabaikan dan terpinggirkan, juga memperjelas keterbatasan dari track kedua dalam merumuskan agenda kebijakan yang penting khususnya masalah ekonomi, politik dan keamanan. Keterlibatan track ketiga tidak bersifat langsung, akan tetapi individu-individu yang umumnya adalah pengusaha-pengusaha kaya mendukung sekaligus bertindak kritis kearah ekonomi, kesalingbergantungan dan rancangan keamanan global yang telah ditekankan oleh pemerintahannya (Emila, Ranny, 2013, hlm 88).

Secara konsep, istilah track keempat, kelima, dan seterusnya dimunculkan karena bertambah sulitnya membedakan mana yang dijalankan oleh agen-agen pemerintah resmi dan yang tidak resmi. Dengan adanya kehendak dalam mengintegrasikan masyarakat sipil menjadi sebuah kekuatan yang memberi tenaga tambahan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri yang juga memberikan jalan masuk kepada para aktivis NGO untuk terlibat dalam aktivitas. Walau tidak secara langsung terlibat, akan tetapi punya peran penting dalam proses pertukaran informasi juga pilihan-pilihan kebijakan pemerintah (Emila, Ranny, 2013).

Tidak seperti track kedua yang sengaja dilibatkan langsung oleh pejabat pemerintah, diplomasi dari track yang lain terutama dilaksanakan dalam forum forum non pemerintah. Tujuan pertemuan dan dialog yang dilaksanakan adalah untuk mencari dukungan publik atas permasalahan global, meyakinkan dan menentukan kedudukan pemerintah dalam kerangka tujuan moral, keamanan dan perdamaian.

Pertemuan- pertemuan serta diplomasi konferensi yang nantinya dijalankan oleh track-track ini ditujukan bukan hanya mengajukan usulan kebijakan, namun juga menetapkan program aksi untuk mereka sendiri yang kemudian dapat diarahkan dan diterima oleh pemerintah negara. Teknologi komunikasi internet menhadi alat untuk mendapatkan simpati publik atas isu yang diperjuangkan, dan juga agar mendapatkann pengaruh global melampaui kemampuan dan kapasitas yang tersedia oleh mereka.

1.6. Metode Penelitian.

1.6.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis akan mengupayakan untuk mendeskripsikan data yang berkaitan dengan **Diplomasi Parlemen DPR RI Terkait Isu Papua Merdeka Dalam Forum *Indonesia Pasific Parliamentary Partmership (IPPP)***. Penulis akan berupaya untuk menjelaskan bagaimana diplomasi Parlemen terkait isu Papua Merdeka dalam forum *Indonesia Pacific Parliamentary Partnershim (IPPP)*

1.6.2. teknik pengumpulan data

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan serta wawancara mendalam. Dalam melakukan pengumpulan data, data primer didapatkan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pihak yang memiliki kaitan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan informan kunci dan subjek penelitian pada umumnya. Informan kunci adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam terkait suatu isu atau komunitas yang menjadi topik dalam bahasan (Bakry, 2019).

Adapun sasaran utama dalam wawancara penelitian ini adalah Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimana peneliti akan berupaya untuk memperoleh data terkait dengan alasan utama Parlemen Indonesia dalam membangun kemitraan dengan Negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan.

1.6.3. Teknik Analisis Data

Miles dan Huber mengungkapkan bahwa alur analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan konsep induksi tiga tahapan diantaranya (Wekke, 2019):

1. Pengumpulan data yang berkaitan dengan diplomasi parlemen DPR RI terkait isu Papua Merdeka dalam Forum *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP).
2. Pengolahan data, proses ini dilakukan setelah data tentang diplomasi DPR RI terkait isu Papua Merdeka dalam Forum *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) terkumpulkan.
3. Verifikasi data, adalah sebuah tahapan untuk menginterpretasikan bagaimana proses diplomasi Parlemen DPR RI terkait isu Papua Merdeka dalam Forum *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP).

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian

2. Batasan materi.

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membatasi penelitian terkait dengan Diplomasi Parlemen DPR RI terkait isu Papua Merdeka dalam Forum *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP). Langkah diplomasi ini dianggap sebagai upaya Indonesia melalui DPR RI membangun harmonisasi serta sebagai upaya untuk mendorong kerjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang saling menguntungkan di antara sesama Negara.

3. Batasan waktu.

Batasan waktu dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2018 sampai 2023. Pada tahun 2018 merupakan titik awal dari proses pembangunan kerjasama antara DPR RI dengan parlemen Negara-negara di kawasan pasifik Selatan melalui sebuah forum kerjasama yaitu *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP). Sedangkan batasan akhir 2023 adalah karena penulis menyadari bahwa perlu adanya suatu batasan dalam penelitian ini karena masih bersifat prediktif dan proses kerja sama ini masih berlangsung.

1.7. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis menguraikan hipotesis sebagai berikut:

1. Diplomasi parlemen terkait isu papua dalam forum kerjasama *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership*, bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasional terkait disintegritas dan perpecahan, dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di papua.
2. Membangun kesadaran kepada negara-negara di kawasan pasifik selatan yang pro terhadap gerakan papua merdeka bahwa Negara Indonesia betul-betul hadir untuk masyarakat papua dan apa yang selama ini terjadi adalah tidak benar adanya.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan dalam penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan bagian-bagian seperti pernyataan yang memuat signifikansi penelitian, pernyataan penelitian, tujuan serta manfaat dari penelitian, tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis yang memuat konsep dasar penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN

Pada bab II akan menjelaskan terkait hubungan Indonesia dengan Negara-negara kawasan Pasifik Selatan.

BAB III DIPLOMASI PARLEMEN TERKAIT ISU PAPUA MERDEKA DALAM FORUM *INDONESIAP PACIFIC PARLIAMENTARY PARTNERSHIP*

Pada Bab IV ini penulis akan memaparkan bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI dalam *Terkait Isu Papua Merdeka*

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Selain itu, bab ini juga memuat saran bagi peneliti yang tertarik untuk melanjutkan penelitian yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN

Hubungan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan telah lama terjalin dan terus mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Termasuk dalam hal Isu Hak Azasi Manusia di negara- negara kawasan Pasifik. Isu papua merdeka menyita perhatian negara di kawasan Asia Pasifik. Dalam menjaga kedaulatannya, Indonesia melakukan berbagai upaya, termasuk menyuarakan posisinya baik dalam forum regional maupun internasional serta menggunakan soft power-nya guna menekan upaya dukungan Negara-negara di kawasan pasifik selatan terkait Isu Papua Merdeka.

Dalam rangka meningkatkan stabilitas dan kesadaran internasional tentang isu Papua Merdeka, Indonesia harus berkoordinasi dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia harus meningkatkan diplomasisnya dengan negara-negara di kawasan ini untuk meningkatkan kerjasama dan kesadaran internasional tentang isu Papua Merdeka.

2.1. GEOPOLITIK DI KAWASAN PASIFIK SELATAN

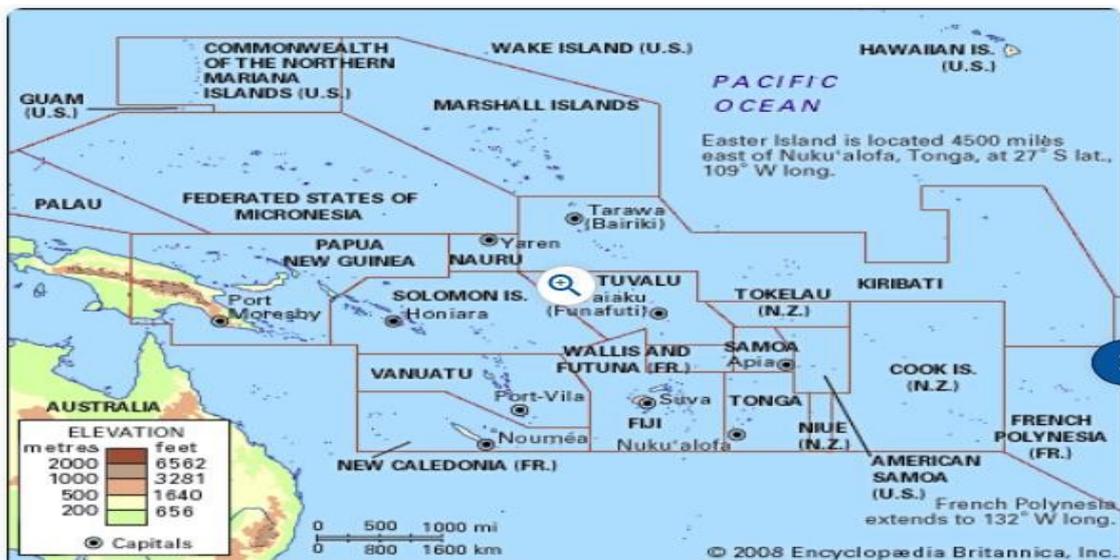
Dinamika politik global mendorong Indonesia memperhatikan Kawasan Pasifik Selatan sebagai titik sentral dalam konstruksi Geopolitik di dengan negara-negara di kawasan tersebut. Untuk itu negara indonesia perlu melakukan berbagai analisa dan pembahasan Urgensi serta Langkah-langkah untuk berperan dalam menjaga stabilitas dan konduktifitas di Kawasan Pasifik Selatan (Kemhan.go.id)

2.1.1. Wilayah Kepulauan Pasifik.

Pasifik Selatan adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan wilayah teritori yang kecil. Negara-negara tersebut sangat rentan terhadap intervensi asing akibat kondisi geografis mereka yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan

dagang dan untuk menaruh pangkalan militer di masa Perang Dunia. Setelah Perang Dunia ke-2 berakhir, kawasan ini tetap menjadi perebutan bagi kekuatan-kekuatan besar, baik itu negara seperti Tiongkok maupun Australia dan Indonesia yang merupakan bagian dari Pasifik Selatan sendiri, juga turut serta dalam usaha memperebutkan pengaruh di wilayah Pasifik Selatan.

Pasifik Selatan mayoritas dihuni oleh negara-negara kepulauan dengan negara seperti Fiji, Samoa, Vanuatu dan negara lain termasuk didalamnya. Sedangkan Indonesia sendiri juga negara di kawasan yang memiliki luas wilayah, populasi dan kekuatan militer terbesar di kawasan Pasifik Selatan sehingga menjadi salah satu aktor utama di kawasan tersebut. Setiap kejadian maupun kegiatan yang berlangsung di Pasifik Selatan di negara-negara kawasan Pasifik Selatan tidak lepas dari perhatian serta kebijakan luar negeri pemerintahan Indonesia, mengingat hal tersebut bisa berimbas bagi kepentingan nasional Indonesia,



Gambar 2.1.1 Peta kepulauan pasifik

Sumber: Britannica

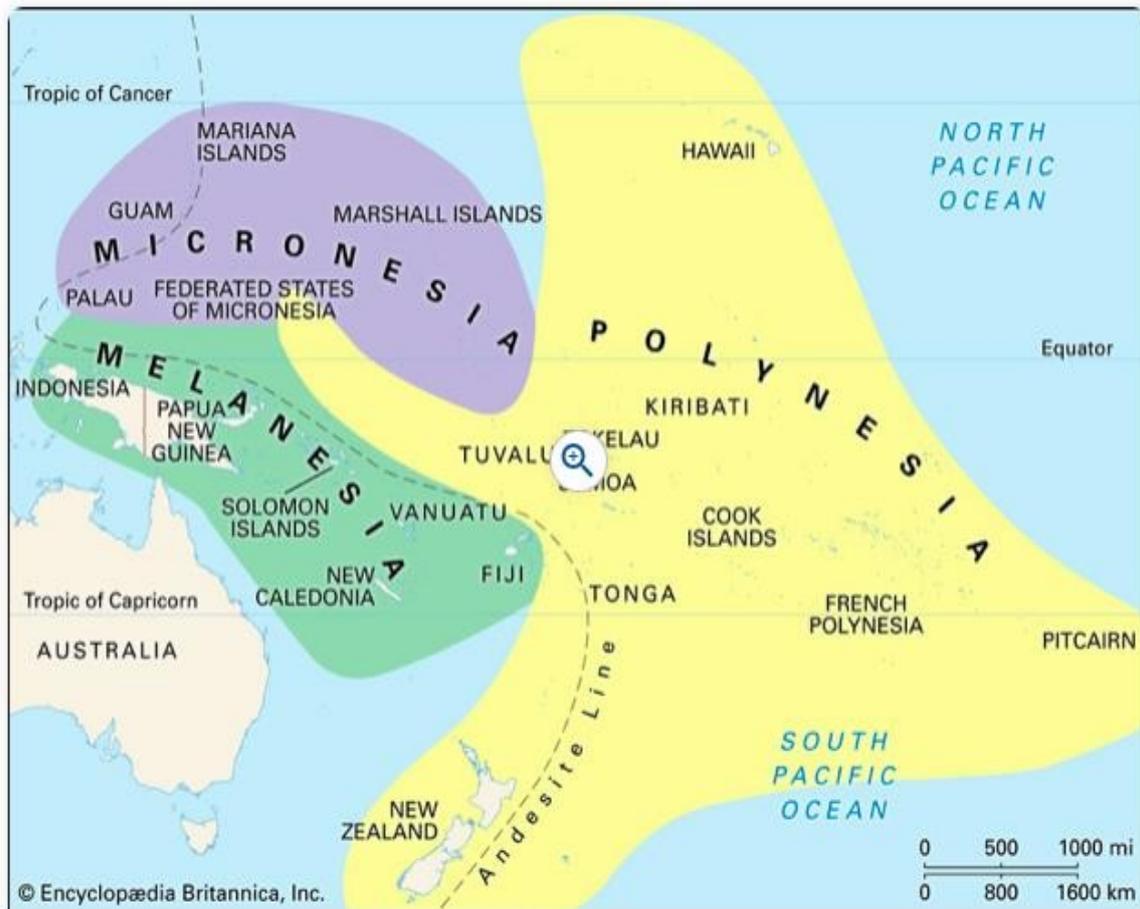
Wilayah geografis pulau di Samudera Pasifik Ini terdiri dari tiga kelompok etnogeografis diantaranya: Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Tetapi secara konvensional tidak termasuk benua pulau tetangga Australia, kepulauan Indonesia,

Filipina dan Jepang yang terkait dengan Asia, serta busur pulau Ryukyu, Bonin, Gunung Berapi, dan Kuril yang menjorok ke arah laut dari Jepang. Istilah ini juga tidak mencakup kepulauan Aleutian atau pulau-pulau terpencil di Samudera Pasifik seperti gugusan Juan Fernandez di lepas pantai Amerika Selatan (Britannica).

Wilayah Kepulauan Pasifik mencakup lebih dari 300.000 mil persegi (800.000 km persegi) daratan di mana Selandia Baru dan pulau Nugini mencakup sekitar sembilan persepuluhnya dan jutaan mil persegi lautan. Ini adalah campuran dari negara-negara merdeka, negara-negara terasosiasi, bagian integral dari negara-negara kepulauan non-Pasifik, dan negara-negara bergantung (Britannica)

2.1.2. Budaya dan suku di Kepulauan Pasifik.

Pulau-pulau berbentuk busur besar yang terletak di utara dan timur Australia dan selatan Khatulistiwa disebut Melanesia (dari kata Yunani melas yang berarti “hitam” dan nēsos yang berarti “pulau”) bagi masyarakat yang sebagian besar berkulit gelap di Pulau New Guinea. Kepulauan Bismarck, Kepulauan Solomon, Vanuatu (Hebrides Baru), Kaledonia Baru, dan Fiji. Di utara Khatulistiwa dan di timur Filipina terdapat kepulauan Mikronesia, yang membentuk busur yang membentang dari Palau, Guam, dan Kepulauan Mariana Utara di barat ke arah timur melalui Negara Federasi Mikronesia (Kepulauan Caroline), Nauru, dan Kepulauan Marshall hingga kiribati (Britannica)



Gambar 2.2.1 potret sebaran Ras di kepulauan pasifik

Di Pasifik timur, yang sebagian besar tertutup dalam segitiga besar yang dibentuk oleh Kepulauan Hawaii di utara, Selandia Baru di barat daya, dan Pulau Paskah (Rapa Nui) jauh di timur, terdapat banyak pulau (“poli”) di Polinesia. Komponen lain dari pulau-pulau yang tersebar luas ini, umumnya dari barat ke timur, adalah Tuvalu, Wallis dan Futuna, Tokelau, Samoa (bekas Samoa Barat), Samoa Amerika, Tonga, Niue, Kepulauan Cook, dan Polinesia Prancis (termasuk Masyarakat, Pulau Tuamotu, dan Marquesas).

Pulau-pulau utama di Pasifik terbentang miring di garis Khatulistiwa dari barat laut ke tenggara dan dapat dibagi menjadi dua wilayah fisiografik utama berdasarkan tipe

pulau, benua dan samudera. Palung laut dalam membentuk Garis Andesit di sepanjang perbatasan timur Jepang, Mariana, Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, dan Selandia Baru. Garis tersebut memisahkan pulau-pulau vulkanik basaltik di Pasifik tengah dan timur dari pulau-pulau di tepian Pasifik barat yang luas, yang sebagian besar terbentuk dari batuan bermetamorfosis, sedimen, dan material vulkanik andesitic (Britannica).

2.1.3. Sistem Politik Negara-Negara di Kepulauan Pasifik dan Permasalahannya

Sistem politik suatu negara sejatinya turut mengatur kehidupan masyarakat yang ada di negara tersebut. Suatu sistem politik dari beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan pun umumnya berlaku serupa, dan kerap menjadi ciri khas dari suatu kawasan secara luas. Pernyataan tersebut diperkuat dengan sistem politik yang ditemukan di kawasan Kepulauan Pasifik, yang pada umumnya terklasifikasi ke dalam pola kentalnya pola kultural Melanesia ataupun Polinesia (Sahlins, 1963: 286).

Secara garis besar kentalnya pola kultural dalam sistem politik negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik ditunjukkan oleh struktur sosial egaliter dengan kepemimpinan seorang big men bagi pola kultural Melanesia (Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan kelompok-kelompok pulau di bagian Timur dari Fiji) ataupun ditunjukkan oleh struktur sosial yang terstratifikasi dengan keberadaan seorang pemimpin berupa chief bagi pola kultural Polinesia (Easter Island dan kepulauan Hawaii).

Dalam kasus negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik, sistem politik yang kental dengan pola kultural seperti demikian justru kerap menjadi permasalahan karena adanya peluang persaingan antar masyarakat dalam struktur sosial termasuk di dalamnya adalah isu ras yang mengancam stabilitas politik.

Seperti yang telah penulis singgung diatas bahwa, meskipun pola kultural Polinesia dan Melanesia memiliki sistem politik khususnya terkait pemimpin yang berbeda, diyakini bahwasanya pola kultural Polinesia dengan pemimpin seorang chief pada dasarnya merupakan bentuk evolusi dari pola big men sebagaimana dalam pola kultural Melanesia (Sahlins, 1963: 287 – 290).

Kepemimpinan seorang chief yang didapatkan berdasar pada garis keturunan dengan pengabsahan kepercayaan setempat, sebelumnya dalam kepemimpinan seorang big men membutuhkan usaha seperti halnya berkompetisi yang kemudian penilaiannya diserahkan kepada masyarakat berwenang. Terpilihnya seseorang sebagai big men tidak lain dipengaruhi pula oleh kemampuan finansial yang mana kemampuan finansial tersebut dapat digunakan untuk mengakses kekuasaan. Hal ini pada akhirnya berpengaruh dalam sistem politik modern di negara-negara bagian Melanesia.

Selanjutnya dalam prestige-good system, pemimpin yang diperhitungkan adalah pemimpin yang memiliki kemampuan dalam mengontrol bahkan memonopoli barang-barang impor dengan kualitas tinggi. Sistem ini ditandai pula oleh kecenderungan bilinear yang asimetris dalam sistem kekerabatan dan dualisme politik yang asimetris seperti halnya pemimpin keagamaan vs pemimpin politik, penduduk asli vs penjajah, juga perempuan vs laki-laki (Hage dan Harary, 1996: 116 – 7).

Adapun berdasarkan pemaparan mengenai pola kepemimpinan great men dapat dipahami bahwa kedudukan pemimpin di kawasan Kepulauan Pasifik tidak diperoleh atas dasar garis keturunan, melainkan diperoleh melalui keahlian wiraswasta dan/atau prestasi. Dalam pola kepemimpinan great men, peran penting pemimpin meliputi ritual master (pemimpin agama) dan warrior (pemimpin perang) (Hamid, 1996: 272).

Berkaitan dengan sistem politik yang ditemui di negara-negara kawasan Kepulauan Pasifik, tentu terdapat permasalahan-permasalahan yang mengiringi. Seperti yang sudah disinggung, kentalnya pola kultural dan nilai lokal seperti pengaruh struktur sosial dalam sistem politik di negara-negara kawasan Kepulauan Pasifik justru rentan akan permasalahan instabilitas politik, bahkan negara-negara yang dimaksud dijuluki dengan *island of instability*.

Beberapa permasalahan yang kerap ditemui antara lain adalah krisis politik dan kudeta pemerintahan. Konflik internal yang seperti demikian menjadi ancaman utama bagi keberlangsungan perpolitikan negara-negara kawasan Kepulauan Pasifik, alih-alih serangan dari luar negara yang nyaris tidak ditemukan. Satu hal yang perlu diketahui adalah struktur sosial dan kepemimpinan yang sarat akan faktor finansial dan ekonomi

lainnya dalam pola kultural di negara-negara kawasan Kepulauan Pasifik menjadi salah satu penyebab ketidaksetaraan yang meluas pada konflik politik.

Lebih lanjut, ketidaksetaraan dalam konteks ekonomi khususnya menjadikan fasilitas hidup seperti pendidikan terpusat pada pusaran elit saja, sehingga pengetahuan masyarakat luas akan proses politik rendah. Hal ini berujung pada isu pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnegara terhadap masyarakat sipil. Dua permasalahan berkaitan dengan sistem politik yang ditemukan di negara-negara kawasan Kepulauan Pasifik seperti demikian dikategorikan oleh Stephanie Lawson (2003) sebagai social violence (permasalahan berada pada tingkat sosial dan relasi personal) serta state violence (permasalahan berada pada tingkat aparaturnegara dan masyarakat sipil).

Bagaimana pun, meski berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara kawasan Kepulauan Pasifik bersumber dari dalam diri mereka karena menyangkut persoalan sistem politik, berbagai permasalahan tersebut dinilai tetap mengganggu terbentuknya konsep keamanan yang ideal bagi masyarakat mereka.

Ada beberapa alasan pentingnya Indonesia di Pasifik Selatan diantaranya sebagai berikut:

Pertama. Keberadaan sumber daya alam: Pasifik Selatan kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas alam, dan ikan. Kehadiran Indonesia di daerah ini penting untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan negara, terutama dalam hal pengelolaan dan pemantauan sumber daya alam tersebut

Kedua. Jalur perdagangan strategis: Pasifik Selatan merupakan jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Kepentingan pertahanan Indonesia di daerah ini adalah untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas kapal yang melintasi area tersebut, baik dari segi perdagangan maupun alasan militer.

Ketiga. Kehadiran Indonesia sebagai negara maritim: Sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah serta perairan di sekitarnya, termasuk Pasifik Selatan. Dengan memperkuat kehadirannya di daerah ini, Indonesia dapat memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah maritimnya.

Keempat. Kemitraan dan kerjasama regional: Pasifik Selatan merupakan wilayah yang penting dalam kerjasama regional, baik dalam hal keamanan, politik, maupun ekonomi. Kehadiran Indonesia di daerah ini memungkinkan negara kita untuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik Selatan, seperti Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Kepulauan Pasifik.

Kelima. Pengaruh geopolitik: Pasifik Selatan merupakan area yang menjadi fokus pengaruh geopolitik dan kepentingan global, terutama dengan adanya persaingan kekuatan antara negara-negara besar di kawasan tersebut, seperti China dan Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia di daerah ini memungkinkan negara kita untuk menjaga stabilitas dan mengimbangi kekuatan-kekuatan tersebut, serta menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.

2.2. INDONESIA PACIFIC PARLIAMENTARY PARTNERSHIP (IPPP)

Kawasan Pasifik menjadi semakin penting bagi Indonesia dari segi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan meningkatnya eskalasi di Laut China Selatan dan semakin gencarnya pengaruh China di kawasan Pasifik, serta meningkatnya gerakan internasionalisasi isu Papua, Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik tidak dapat lagi memandang kawasan Pasifik sebagai pintu belakang, namun sebagai kawasan yang penuh tantangan dan kesempatan ke depan. (BKSAP, 2020).

Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) merupakan sebuah forum kerja sama parlemen yang di inisiasi oleh DPR RI dalam rangka memberikan dukungan dan penguatan terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap kawasan pasifik yang di kenal dengan sebutan “indo-Pacific Outlook” dan kemudian diadopsi sebagai cara pandang Negara-negara di Asia Tenggara. Focus pemerintah Indonesia dalam kebijakan berorientasi Kawasan tersebut antara lain: Penguatan kerja sama maritim, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SGDs) serta Konektifitas regional (BKSAP, 2020).

Selain ketiga hal tersebut, Pemerintah juga menyadari bahwa di masa yang akan datang, masa depan dan kedaulatan wilayah Indonesia akan sedikit banyak dipengaruhi

oleh dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan Pasifik. Oleh karena itu pelaksanaan IPPP merupakan langkah diplomasi yang memiliki tujuan jangka panjang untuk membangun komunikasi, dialog, kerja sama serta kesepahaman antara DPR RI dengan Parlemen negara-negara Pasifik, mengenai pentingnya mewujudkan kemajuan bersama yang berlandaskan penghormatan pada kedaulatan wilayah masing-masing negara. (BKSAP, 2020).

Keberhasilan Inisiatif BKSAP dalam menyelenggarakan Sidang Pertama Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) Tahun 2018 dapat menjadi batu uji bagi peran diplomasi parlemen Indonesia di kawasan Pasifik ke depan. DPR RI perlu segera mengambil peran aktif untuk memperkuat peran dalam diplomasi parlemen di kawasan Pasifik. (BKSAP 2020)

Penyelenggaraan IPPP yang pertama telah menghasilkan Chair's Statement yang memuat kesepakatan berupa "komitmen untuk saling terlibat di masa mendatang dan menyepakati untuk mengeksplorasi inisiatif program kerja sama antar parlemen, termasuk melalui kerjasama teknis untuk mendukung kinerja parlemen, workshop/seminar dan program-program lainnya yang ditujukan untuk memperkuat dialog antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Disamping itu penyelenggaraan IPPP yang pertama juga mendapatkan sambutan yang sangat baik. Ini terlihat dari kehadiran 14 Parlemen Negara Pasifik di Sidang tersebut (BKSAP, 2020)

Hasil dari Sidang Pertama IPPP ini juga bersinergi dengan upaya diplomasi KBRI di Wellington yang menggelar The First Pacific Exposition 2019 pada 12-14 Juli 2019 di Auckland Selandia Baru. DPR RI mengharapkan penyelenggaraan Sidang Kedua IPPP akan menghasilkan langkah-langkah yang lebih konkrit untuk kemitraan Indonesia-Pasifik dalam waktu dekat.

2.3. KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERKAT ISU PAPUA.

2.3.1. Dinamikan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Pasifik Selatan

Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang begitu tinggi, menempatkannya sebagai salah satu negara Asia-Pasifik yang juga mengakomodir serta mengayomi pelbagai identitas suku bangsa. Selain didominasi oleh kelompok masyarakat beretnis Malayo-Polynesia, Indonesia juga dihuni oleh masyarakat rumpun pasifik lainnya dengan presentase yang bahkan cukup tinggi. Letak geografisnya yang berada di antara dua samudera (Pasifik dan Hindia) dan dua benua (Asia dan Australia), membentuk identitas serta politik luar negeri Indonesia yang dinamis dan holistik. Populasi ras melanesia di Indonesia mencapai 13 juta orang yang tersebar di Papua, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Sementara itu, persebaran ras melanesia di luar negeri mencapai 9 juta orang. Mereka tersebar di Papua Nugini, Timor Leste, Vanuatu, New Kaledonia, Solomon Island, dan Fiji (Soloposnews, Sri Sumi Handayani 2022). Sehingga hal inilah yang kemudian membuat Indonesia semakin berani untuk menunjukkan citra dirinya melalui berbagai pendekatan dan kebijakan Luar Negerinya terhadap negara-negara di kawasan Pasifik lainnya.

Sebagai salah satu pemain penting di dalam Kawasan ini, Indonesia telah lama berusaha untuk terlibat aktif dalam berbagai forum di Kawasan ini. Di tahun 2018, dengan di Indonesia menginisiasi sebuah forum kerjasama Parlemen antara Indonesia dengan Negara-negara di kepulauan Pasifik bersamaan dengan meningkatnya Isu Papua di pentas politik Global, Indonesia Terus melakukan berbagai cara untuk tetap mempertahankan wilayah kedaulatannya sekaligus berusaha agar mampu mengontrol informasi dan fabrikasi data yang dilakukan oleh negara-negara pasifik yang menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat. Kemudian dengan pelbagai usaha dan kerja keras, upaya Indonesia kian semakin membuahkan hasil. Melalui kedekatannya dengan beberapa negara di kepulauan pasifik, perlahan Indonesia mulai memperoleh posisinya di dalam sub-regional ini.

Pada tahun 2015 pun, Indonesia menyelenggarakan *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) pertama di Jakarta. Kegiatan ini di hadiri oleh hamper seluruh negara di kepulauan pasifik. Dan mendapatkan apresiasi dan

antusiasisme yang baik sangat baik. Meski demikian, dalam kehadirannya sebagai inisiator IPPP, Indonesia tidak selalu berada dalam situasi yang menguntungkan. Dalam banyak kesempatan, Indonesia harus berhadapan dengan pelbagai tuduhan dan manuver politik negara-negara pasifik itu, seperti Vanuatu misalnya yang cenderung lebih aktif berbicara tentang Isu Papua.

Hal ini kemudian memupuk semangat Indonesia untuk juga menggunakan pelbagai strategi terbaik untuk dapat memengaruhi negara-negara kecil di samudera pasifik. Demikian Indonesia menggunakan dua strategi melalui kebijakan perdagangan dan bantuan ekonomi. Kondisi ini didorong oleh fakta bahwa kondisi ekonomi negara-negara di Pasifik Selatan sangat bergantung pada investasi dan bantuan ekonomi negara lain. Indonesia menggunakan kebijakan-kebijakan di Pasifik Selatan secara tidak langsung agar mereka dapat bergantung kepada Indonesia.

Kesadaran ini jugalah yang pada akhirnya membuat semangat Indonesia untuk kemudian “melihat ke timur”, yakni sebuah perspektif baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam memahami konteks dan eksistensi dirinya, serta berusaha melihat tantangan dan peluang persaingan yang positif, yang dapat dikerjakan oleh Indonesia dan negara-negara kepulauan pasifik.

Pada dasarnya kebijakan ini didorong oleh pelbagai faktor yang domestik sehingga kemudian menginspirasi kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah melalui visi pembangunan Joko Widodo yang diajukan pada awal masa kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia.

Dalam Sembilan poin besar Nawacita Presiden Joko Widodo yang bercirikan tiga aspek utama yakni kehadiran negara, membangun dari pinggiran dan revolusi mental sangat eksplisit menjelaskan bagaimana Indonesia berusaha untuk mengayomi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau sebelumnya sebagai sinyal keseriusan dan komitmennya bagi rakyatnya sekaligus bagi negara-negara yang sejak lama menjadi pendukung pembebasan Papua dan Papua barat yang notabene merupakan salah satu wilayah yang diklasifikasikan sebagai daerah tertinggal dan terdepan dengan akses pembangunan yang dapat dikatakan cenderung minimalis dibandingkan wilayah Indonesia lainnya.

2.3.2. Isu Papua di Kancan Politik Global

Papua merupakan sebuah wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri dari dua provinsi (Papua dan Papua Barat) yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini di sebelah Timur. Posisinya yang berada tepat di wilayah paling timur Indonesia, menjadikannya sebagai salah satu wilayah yang mengalami keterlambatan pembangunan serta adanya disparitas sosial-ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Permasalahan ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam catatan sejarah Indonesia. Sejak Indonesia berhasil memperoleh kedaulatan penuh dari Belanda di tahun 1950 hingga saat ini, wilayah Papua dan kebanyakan wilayah Indonesia timur lainnya memang memiliki permasalahan pembangunan yang cukup tinggi karena pelbagai faktor geografi yang secara alami menjadi tantangan besar bagi akses dan mobilitas pembangunan yang luas dan baik di sana.

Hal ini semakin diperparah dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menanut sistem negara kesatuan dengan kepemimpinan terpusat di pulau Jawa, menjadikan wilayah-wilayah terluar dari core power seperti Papua dan Papua Barat mengalami kesenjangan pembangunan yang sangat tinggi.

Isu mengenai kesenjangan dalam pembangunan di Papua pun dapat dikatakan baru mulai benar-benar didengarkan pada tahun 2000 bersamaan dengan peristiwa lepasnya Timor Leste dari Indonesia di tahun 1999. Momentum ini bagi sebagian kelompok adalah sebuah momentum tepat untuk juga menyuarakan keresahan rakyat atas peliknya masalah-masalah integrasi yang dialami oleh masyarakat Papua sejak direbut kembali oleh Indonesia pada tahun 1960an.

Isu-isu mengenai pelanggaran HAM serta perusakan ekosistem hutan yang begitu massif terjadi, semakin menyebar luas ke telinga publik dan menjadi isu yang semakin panas untuk diperbincangkan. Atensi yang besar diperoleh serta kuatnya semangat kelompok garis keras dari masyarakat Papua itu sendiri untuk merdeka, menempatkan isu disintegrasi Papua pun kian populer dalam berbagai sidang pertemuan dunia bahkan

menjadi sebuah produk relasi kekuasaan untuk menjadi alat penawar di antara elit politik global maupun nasional.

Meski demikian dalam usaha untuk kembali merekatkan hubungan yang “renggang” dengan masyarakat dan seluruh entitas Papua dan Papua Barat akibat meningkatnya isu-isu sosial kemasyarakatan. Indonesia pada tahun 2014 melalui visi pembangunan yang diajukan oleh Joko Widodo sebenarnya telah berupaya keras untuk melihat kesenjangan dan gap interaksi pusat dan daerah yang ada.

Komitmen Indonesia dengan membangun wilayah-wilayah tertinggal dan terdepannya yang ada di Papua, hadir sebagai bukti dan symbol kedaulatan dan keseriusan negara untuk mensejahterakan masyarakat, bahkan meningkatkan kualitas hidup adalah beberapa hal yang dapat diklasifikasikan sebagai perwujudan usaha Indonesia terhadap pelbagai tantangan yang muncul secara domestik dan internasional sehingga perlu ditangani secara tepat tanpa menimbulkan dampak buruk yang mempertanyakan kembali kedaulatan serta komitmen tersebut.

Walaupun begitu usaha ini masih tetap dipandang bagi para simpatisan. Usaha Indonesia dianggap sebagai usaha negara untuk menutup-nutupi kesalahan dan ketidakmampuannya untuk mengatur dan mengayomi seluruh entitasnya. Dengan kata lain, meskipun pembangunan dan perbaikan terus berlangsung, isu ini terus bergulir dalam forum-forum Internasional, sehingga Indonesia merasa penting dan perlu untuk melakukan sesuatu terhadap isu ini untuk kembali dapat memegang kendali atas kedaulatan serta bargaining powernya di wilayah kedaulatannya bahkan dalam pentas politik global.

Demikian isu mengenai Papua ini penulis uraikan lebih lanjut pada bab selanjutnya untuk melihat bagaimana perilaku serta sikap negara-negara anggota IPPP tersebut dalam melihat Isu Papua Merdeka ini dimulai dan dimanifestasikan dalam tuntutan kelompok simpatisan yang menamakan dirinya sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk dapat memperoleh kesempatan “self-determination” atau penentuan nasib sendiri. Usaha ini tidak lain adalah upaya untuk dapat memobilisasi usaha-usaha untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati bagi bangsa Papua dari Indonesia.

2.3.3. Indonesia dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

Di level internasional, hampir setiap tahun Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengangkat isu Papua dalam forum PBB. Dimulai dari Sidang Majelis Umum PBB 2016, Perdana Menteri Vanuatu dan Kepulauan Solomon, 5 yang didukung oleh Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Tonga dan Palau, mengkritik catatan HAM di Papua dan mendesak PBB agar ikut turun tangan terkait pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat (Blades, *Pacific Leaders Raise West Papua at the UN*, 2016). Usaha Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam pengangkatan isu Papua ini terus berlanjut hingga pertemuan Sidang Majelis Umum PBB 2019.

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga kedaulatan, melalui delegasinya, membantah segala tuduhan Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Pada Sidang Majelis Umum PBB 2016, delegasi Indonesia Nara Rakhmatia, menyatakan bahwa Indonesia menilai apa yang dilakukan tujuh negara di Kepulauan Pasifik itu telah melanggar Piagam PBB dengan mengintervensi kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorial. Tuduhan tersebut bermotif politik untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial dalam negeri mereka sendiri. Delegasi Indonesia juga mengkritik penggunaan forum Majelis Umum PBB oleh negara-negara tersebut, yang mana seharusnya membahas implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) bukan mengintervensi kedaulatan dan integritas negara tertentu (Aualiitia, 2016).

Pada Sidang Majelis Umum PBB 2019, melalui delegasi Rayyanul Sangaji, Indonesia kembali mempertanyakan motif dan pertanggungjawaban dari Vanuatu terkait tuduhan isu Papua. Indonesia menyebut motif Vanuatu bukan dilatari kepedulian terhadap HAM, melainkan kepentingan negara itu mendukung gerakan separatis di Indonesia. Indonesia meminta Vanuatu untuk kembali membaca fakta dan catatan sejarah, situasi terkini, serta perkembangan HAM di Indonesia yang sudah progresif. Indonesia juga kembali menegaskan bahwa Papua adalah bagian yang tidak dapat dibatalkan dari Indonesia dan itu adalah keputusan akhir yang tidak dapat dibalikkan

dan permanen, merujuk pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera atau *Act of Free Choice*) 1969 yang diadopsi menjadi Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (Septiari, 2019).

2.3.4. Pendekatan Bilateral Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan

Dengan meningkatnya masalah Papua kanca Internasional, Indonesia kemudian mencoba menekankan pada hubungan bilateral antar negara- negara Pasifik Selatan. Walaupun tergolong negara kecil, tetapi di forum internasional seperti PBB, suara mereka tetap akan diperhitungkan sehingga Indonesia harus melakukan upaya pendekatan tersebut. Hal ini berfungsi agar Indonesia mempunyai teman yang bisa mendukung apa yang menjadi kebijakannya dalam berbagai kesempatan di forum-forum dunia. Pertama-tama, Indonesia mencoba meningkatkan hubungan dengan Fiji yang dianggap sebagai negara yang berpengaruh baik di MSG maupun di wilayah Pasifik Selatan (Makareta Komai, 2015)

Setelah terjadi kudeta di Fiji tahun 2006, Indonesia membantu Fiji dengan transformasi dari rezim militer menjadi demokrasi dan juga memberikan bantuan teknis di beberapa bidang. Indonesia juga berperan penting dalam membantu mengembangkan Pacific Islands Development Forum (PIDF) yang dibentuk oleh Fiji setelah keanggotaannya dalam PIF ditangguhkan oleh tekanan Australia dan Selandia Baru atas kudeta yang terjadi. Melalui PIDF, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan bantuan dan keterlibatan⁷ serta menawarkan diri sebagai saluran dimana negara-negara Pasifik, terutama Fiji, dapat berinteraksi tidak hanya dengan kawasan Asia yang dinamis, tetapi juga kawasan yang lebih luas. Bantuan dan tawaran tersebut tampak berhasil karena hampir tidak adanya penyebutan tentang isu Papua di forum resmi tersebut (Webb-Gannon, 2014).

Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan saat melakukan kunjungan kehormatan, juga sempat memberikan bantuan sebesar US\$5 juta sebagai simpati atas bencana Topan Winston yang terjadi di Fiji pada akhir Februari 2016. Indonesia juga sempat memberikan bantuan kemanusiaan untuk

Vanuatu saat dilanda bencana Topan Pam pada 2015 sebagai bentuk simpati dan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia memperkokoh hubungan bilateral dengan Pemerintah Vanuatu (Nursalikhah, 2015).

Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi sangat memperhatikan kawasan Pasifik Selatan terutama negara-negara Melanesia yang memiliki kerawanan bencana, sama seperti yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Sehingga momentum bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh kedua negara untuk memperkuat kerjasama tak hanya dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana yang dapat mengancam masing-masing negara, namun juga kerjasama di bidang lain yang sejalan dengan tantangan dan potensi kedua negara.

Indonesia mencoba mengkontruksi pemikiran dari negara-negara Melanesia tentang kebaikan Indonesia, sehingga dapat berdampak pada dukungan terhadap Indonesia dalam isu Papua. Selain Fiji, Indonesia juga berhasil dalam meningkatkan hubungan dengan Papua Nugini yang mana telah menunjukkan dukungannya terhadap Indonesia di forum terbuka. Dalam kunjungannya ke Papua Nugini pada Maret 2015, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Papua Nugini merupakan tetangga penting bagi Indonesia. Papua Nugini merupakan negara yang strategis untuk dijadikan sebagai partner kerjasama dalam menjaga keamanan di Papua, terutama untuk mempersempit ruang gerak kelompok separatis yang ingin melarikan diri ke Papua Nugini (Humas, 2015).

Usaha membangun hubungan bilateral dengan negara-negara di regional Pasifik juga telah menjangkau tujuh negara Pasifik yang sebelumnya mengangkat dan mendukung isu Papua di forum PBB tahun 2016. Di antara tujuh negara tersebut, beberapa diantaranya seperti Nauru dan Tuvalu telah merubah posisinya. Presiden Nauru, Baron Waqa, mengatakan bahwa negaranya mendukung setiap langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat. Sementara Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, menyatakan sikap tidak ingin campur dengan kebijakan Indonesia. Tuvalu sangat menghargai HAM, termasuk kebudayaan, tetapi Tuvalu tidak punya posisi untuk ikut campur dalam masalah tersebut.

Pernyataan kedua pemimpin negara tersebut muncul setelah kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Wiranto, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Nauru ke-50 tahun 2018. Dalam perayaan tersebut, pemerintah Indonesia juga turut menyemarakkan dengan menampilkan band musik asal Papua dan Papua Barat yang juga membawa misi persahabatan pemerintah Indonesia (Erdianto, 2018).

Selain itu, pemerintah Indonesia mencoba meningkatkan hubungan bilateral antar negara-negara Pasifik Selatan melalui soft diplomacy. Soft diplomacy merupakan perangkat penting dalam pelaksanaan diplomasi publik yang pada dasarnya bertujuan untuk menginformasikan, melibatkan dan mempengaruhi persepsi publik. Soft diplomacy yang dimaksud disini adalah melakukan pendekatan melalui bidang sosial dan budaya yang memanfaatkan instrumen kerjasama pelatihan, beasiswa, pembangunan dan lain-lain.

Indonesia sendiri mempunyai beberapa program yang terbuka dan ditujukan untuk negara-negara Pasifik seperti Dharmasiswa, festival Melanesia dan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI). Program-program pemerintah tersebut berguna untuk membangun citra baik kepada para warga asing yang ingin mempelajari kebudayaan Indonesia lebih dalam dan akan penulis jelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

BAB III

DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA NEGARA-NEGARA DI KAWASAN KEPULAUAN PASIFIK

3.1. DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DALAM FORUM *INDONESIA PACIFIC PARLIAMENTARY PARTNERSHIP* (IPPP)

Dalam tatanan Globalisasi saat ini yang semakin kompleks dimana ketergantungan antar negara semakin tinggi, diplomasi memiliki kedudukan yang penting tidak hanya sebagai sebuah instrumen untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi efektif antar negara dalam rangka mengatasi berbagai isu internasional yang dianggap sebagai permasalahan bersama (BKSAP, 2018).

Seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu internasional, aktor diplomasi berkembang tidak lagi hanya terfokus pada pemerintah tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, terutama parlemen. Sebagai lembaga demokrasi yang menyuarakan aspirasi rakyat, parlemen diharapkan memiliki peran signifikan dalam penyelesaian isu-isu internasional yang dapat membawa dampak sosial, politik dan ekonomi secara langsung kepada rakyat sebagai konstituen (BKSAP, 2018).

Di Negara Indonesia, Parlemen dalam hal ini DPR RI memiliki fungsi diplomasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan Politik Luar Negeri sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat 2 UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (BKSAP, 2018). Diterangkan dalam Pasal tersebut, bahwasannya penyelenggara Hubungan Luar Negeri terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah. Non-pemerintah yang dimaksud termasuk pula DPR sebagaimana eksplisit dalam penjelasan. Selain itu, peran diplomasi DPR diatur juga dalam Pasal 69 ayat 2 UU No 17 Tahun 2014, di mana fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Begitu pun Pasal 116 UU MD3 yang memberikan mandat kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dalam

pelaksanaan diplomasi parlemen yang mencakup aktivitas internasional DPR baik secara bilateral, maupun multilateral (BKSAP, 2018).

Dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen tersebut, dibentuklah Alat Kelengkapan Dewan yakni Badan Kerjasama Antar Parlemen yang mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI tentang masalah kerja sama antar parlemen sekaligus memperjuangkan dan mempromosikan kepentingan nasional Indonesia (BKSAP,2018).

Di forum Internasional diplomasi parlemen DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui *Inter-Parliament Union* (IPU), *Asian Parliamentary Assembly* (APA), *Asian Pacific Parliament Forum* (APPF), *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA), *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) dan *Parliamentary Union of OIC Members* (PUIC) (BKSAP,2024).

Badan Kerja Sama Antar Parlemen memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan seperti di Rakhine, Myanmar dan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, serta menyuarakan keadilan sosial serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam kerangka hubungan bilateral, Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI membentuk 49 Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) dengan maksud dan tujuan antara lain; menyuarakan kepentingan nasional Indonesia terutama dengan mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat yang merupakan salah satu peran DPR RI dalam pelaksanaan multitrack diplomacy, disamping tentunya bertukar praktik cerdas dan pengalaman terkait isu-isu global yang menjadi fokus bersama seperti SDGs, gender, demokrasi, HAM, Perubahan iklim, kejahatan transnasional terorganisir dan korupsi (BKSAP, 2018).

Selain itu, Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI juga terafiliasi dengan institusi keuangan, perdagangan, dan pembangunan internasional melalui *Parliamentary Committee of the World Trade Organization* (PCWTO), dan *Parliamentary Network on*

IMF and World Bank, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global yang inklusif melalui berbagai agenda di setiap pertemuan yang diadakan sekaligus membangun sinergi institusi – institusi tersebut dengan Indonesia. Dalam pertemuan IMF- World Bank pada tahun 2018 misalnya, BKSAP DPR RI memastikan peningkatan investasi dalam Human Capital dan partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi (BKSAP, 2018).

Selain itu Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI juga merupakan inisiator World Parliamentary Forum for Sustainable Development (WPFSD), sebagai bagian upaya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dengan spirit *no one left behind*. Melalui WPFSD yang dilaksanakan sejak tahun 2017 ini. BKSAP DPR RI mendorong dan memastikan komitmen para pemangku kepentingan dan negara- negara sahabat dalam pencapaian Agenda 2030 terutama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Di Indonesia diplomasi parlemen menjadi salah satu mandat DPR RI yang merupakan implementasi dari *multitrack diplomacy* dengan tujuan untuk memperkuat diplomasi eksekutif (dalam hal ini pemerintah), dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia. Dalam konteks negara demokrasi yang memiliki karakter parlemen lebih lentur dan tidak terikat protokoler kenegaraan, diplomasi dapat dilakukan dengan lebih terbuka oleh parlemen sebagai sarana aspirasi beragam pandangan bilamana perwakilan eksekutif (pemerintah) tidak bisa menyampaikan agenda kepentingan nasional (BKSAP, 2018) Misalnya pada isu yang sensitif antara Indonesia dengan negara sahabat, dimana ketika ada hal-hal yang tidak mungkin disampaikan secara vulgar oleh Eksekutif, maka DPR bisa melakukan diplomasi dengan melobi counterpart-nya di negara tersebut dengan gaya parlemen yang lebih lentur.

Pada tahun 2018, Indonesia menyelenggarakan *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)*, yaitu suatu forum regional negara-negara di Pasifik yang dimotori oleh DPR RI yang bertujuan untuk membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Namun demikian, kepentingan nasional Indonesia yang menjadi landasan utama dibentuknya IPPP oleh DPR RI tersebut adalah isu Papua (BKSAP, 2018).

DPR RI melakukan diplomasi parlemen untuk menggalang parlemen negara-negara Pasifik agar mereka tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok separatis Papua.

Upaya ini dilakukan pada saat diplomasi pemerintah tengah mengalami kebuntuan komunikasi. Komunikasi yang dilaksanakan oleh anggota parlemen dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral termasuk penguatan kerja sama dalam kerangka diplomasi parliament to parliament dan people to people (BKSAP, 2018).

Sebagai negara kepulauan terbesar di jantung Pasifik dan terletak di antara dua samudera, Indonesia terus menjalin kerja sama yang baik dengan negara-negara Pasifik untuk menjamin kawasan yang aman, terbuka, maju, dan sejahtera. Indonesia telah lama menjalin hubungan positif dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan meyakini perlunya peningkatan lebih lanjut dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, serta kemitraan sosial budaya.

Terlepas dari semua peluang pembangunan, Indonesia memiliki tantangan geografis yang sama dengan negara kepulauan di Pasifik. Sumber daya laut yang melimpah yang kita miliki saat ini masih menjadi tantangan dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Pada saat yang sama, kapasitas sumber daya manusia kita memerlukan peningkatan, serta intervensi kebijakan agar dapat memberikan manfaat bagi negara-negara di kawasan.

Dalam hal aliansi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antara Indonesia dan Pasifik, parlemen memainkan peran penting untuk berkontribusi dalam mengembangkan hubungan persahabatan serta dialog dan kerja sama yang saling menguntungkan. Anggota Parlemen mempunyai posisi yang strategis untuk bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga-lembaga negara, serta untuk mendorong dan mengadopsi kebijakan dan perundang-undangan yang berpusat pada masyarakat untuk memastikan tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan (BKSAP, 2018)

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai inisiatif kemitraan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi serta hubungan sosial budaya, termasuk pembangunan manusia dan hubungan antar masyarakat, sebagai bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan wilayah. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan pertemuan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) Pertama yang

dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 23-24 Juli 2018. Empat belas negara mengirimkan delegasinya yang sebagian besar dipimpin oleh Ketua Parlemen masing-masing yang menandakan bagaimana Indonesia memandang satu sama lain sebagai mitra yang penting dan setara.

3.1.1. Membangun Kemitraan untuk Pembangunan Masa Depan Kawasan Pasifik

Pentingnya pembinaan dialog dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Negara-negara Pasifik khususnya dalam hal kerja sama Maritim, forum IPPP dapat semakin memperkuat tanggung jawab kolektif untuk mengelola Samudra Pasifik yang lebih baik, serta memperkuat kerja sama maritim sebagai upaya untuk menjaga stabilitas geopolitik serta mengupayakan pengelolaan sumber daya maritim yang inklusif dan saling menguntungkan bagi Negara-negara di kawasan pasifik selatan.

Dalam pertemuan IPPP pertama di Jakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pidatonya beliau menyatakan pentingnya mengatasi permasalahan bersama antar Negara, mengidentifikasi solusi dan membangun kemitraan. Ia menyuarakan bahwa "Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, melainkan justru menghubungkan kita." Dijelaskannya, forum ini memiliki banyak pertemuan penting yang perlu dibahas. Misalnya, pembangunan kelautan dan perikanan, penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak di atur, polusi plastik laut, pembangunan manusia, dan mendorong ekonomi biru (Summery IPPP, 2018).

Indonesia dan Negara-negara pasifik mempunyai banyak kesamaan, oleh karena itu, penting untuk mendorong konektifitas antar negara. Selain itu, pemerintah Indonesia berencana untuk menginfestasikan pembangunan maritim, membangun pelabuhan baru di kawasan timur Indonesia dengan harapan dapat membangun konektifitas yang kuat dengan Negara-negara Pasifik (BKSAP, 2018).

kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan perlu ditingkatkan, dikarenakan Indonesia memiliki hubungan historis yang cukup lama

tercipta. Dalam Sidang *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability*, di Jakarta, Senin (23/7/2018). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa “Pada akhirnya kami sangat senang dan bangga bahwa kita dapat bertemu di forum ini. Kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik kami pandang sangat penting. Kami percaya bahwa kita dapat bergerak lebih cepat dalam bekerjasama setelah lebih 3 atau 4 dekade kita sedikit melambat, namun sekarang ini ingin kita tingkatkan,” (kemenkomarves, 2018).

Saat ini pembangunan Indonesia tidak hanya berfokus di bagian barat namun juga telah beralih ke bagian timur Indonesia yang berdekatan dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Selain itu Menko Luhut juga menyatakan Bahwa “kita dapat memainkan peranan kita dengan mengajak para delegasi semua untuk melihat apa yang telah kita kerjakan papua. Intinya, melihat maka percaya, kita terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, menaruh perhatian lebih kepada isu hak asasi manusia dan juga peningkatan kualitas pendidikan disana,” (kemenkomarves, 2018).

Selain itu, Isu Ekonomi Biru atau Blue Carbon Economy dan pengembangan kapasitas SDA dan SDM akan menjadi titik berat dalam peningkatan kerjasama. Ada 3 hal penting lanjut Menko Luhut yang digaris bawahi, yaitu, pembangunan ekonomi kawasan pesisir, konservasi ekosistem kelautan dan kehidupan sosial masyarakatnya. Konsep blue carbon economy sangat relevan dengan staretegi yang akan dijalankan, Kita harus percaya penuh bahwa masalah ini harus segera diselesaikan. Selain mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan, Indonesia juga di saat yang sama sangat menaruh perhatian di sektor lingkungan, kelautan dan perikanan berkelanjutan yang sangat penting bagi masyarakat di kawasan (Kemenkomarves, 2018).

Indonesia telah lama menjalin hubungan bilateral dengan negara negara pasifik. Selama bertahun-tahun, jutaan masyarakat Indonesia, termasuk etnis melanesia telah menjalin kemitraan loka di banyak wilayah pasifik, seperti Fiji, Nauru, Micronesia, dan

Samoa. Hal ini menandakan bahwa, masyarakat pasifik memiliki kesamaan dalam aktifitas ekonomi, sosial budaya, serta nenek moyang yang sama. Oleh sebab itu, peran parlemen sangat penting dalam memperkuat hubungan sosial budayah dan ekonomi serta membangun konektifitas yang lebih luas dengan mitra-mitra-mitra pasifik yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia.

3.1.2. Mempromosikan Potensi Ekonomi Biru dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat kita adalah berkaitan dengan laut, hal ini karena laut terbukti memiliki sumber daya ekonomi dan berperan sebagai jalur kehidupan bagi banyak msyarakat. Namun, kelangsungan ekonomi laut kita telah menyebabkan degradasi. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Desra Percaya selaku Direktur Jendral Asia-Pasifik Kementerian Luar Negeri RI dalam Forum *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)* 2018 bahwa, Selama 20 tahun terakhir perekonomian Global telah kehilangan 2,2 triliun USD akibat praktik perikanan yang tidak berkelanjutan, sementara pada saat yang sama lautan juga sangat tercemar. Oleh sebab itu perlu ada penekanan bahwa konsep Ekonomi Biru sangat penting untuk memaksimalkan kelangsungan ekonomi laut dan sumber dayannya, sekaligus tetap mempertahankan keberlanjutannya (Laporan IPPP, 2018)

Negara-negara harus mengadopsi cara-cara yang lebih berkelanjutan untuk memanfaatkan sumber daya kelautannya, untuk memperkenalkan konsep Ekonomi Biru kedalam perekonomian masing-masing negara. Oleh sebab itu Anggota parlemen mempunyai peran penting dalam mempromosikan konsep Ekonomi Biru kepada seluruh pemangku kepentingan di masing-masing negara, serta menjajaki praktek-praktek yang dapat dilakukan oleh Parlemen untuk mendorong cara-cara berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan.

3.1.3. Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dalam Kemitraan Indonesia-Pasifik

Pengetahuan dan keterampilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keterkaitannya dapat diukur dari jumlah anggaran dan upaya yang diinvestasikan di bidang pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan akan berkontribusi pada pengembangan perekonomian negara dan mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sumberdaya manusia juga terkait dengan agenda Global SDGs. Pembangunan sumber daya manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sehingga diperlukan kerjasama kolektif dalam mewujudkannya.

Negara-negara di kepulauan pasifik adalah rumah bagi sekitar 2,2 juta orang dan kurang dari 925.000 di antaranya adalah anak-anak usiah dibawah 18 tahun (laporan IPPP, 2018). Namun, meningkatnya monetisasi di masyarakat pasifik membuat banyak keluarga terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, masyarakat di desa-desa terpencil atau pulau-pulau harus berjuang untuk mencari kebutuhan sehari-hari baik itu biaya sekolah, kebutuhan pokok, atau biaya sosial lainnya. Oleh karena itu permasalahan seperti ini perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan terutama parlemen sebagai pembuat kebijakan dan sekaligus mengawasi jalannya sebuah program agar memastikan persoalan di atas dapat teratasi.

Dalam membangun kawasan pasifik, negara-negara harus melibatkan banyak elemen untuk mewujudkan cita-cita bersama. Hal ini terbukti dengan hadirnya beberapa organisasi Internasional dan berbagai LSM yang ikut dalam membahas isu-isu di kawasan kepulauan pasifik diantaranya:

pertama, *United Nations Development Programme (UNDP)*. Sebagai badan utama PBB dalam pembangunan internasional, UNDP bekerja di 170 negara dan wilayah untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. UNDP membantu negara-negara mengembangkan kebijakan, keterampilan kepemimpinan, kemitraan dan kemampuan kelembagaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan berpusat pada enam bidang pembangunan yaitu: kemiskinan dan kesenjangan, tata kelola, ketahanan, lingkungan hidup, energi, dan kesetaraan gender (UNDP,2024)

Dalam sidang IPPP pertama, *Resident Representative* UNDP yaitu Ibu Anita Nirody menyampaikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan peran perempuan, pemuda dan anak dalam implementasi SGDs berdasarkan pengalaman UNDP di Indonesia dan Negara Pasifik lainnya. Bahwa, implementasi SGDs di Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan, penurunan angka kematian anak, dan peningkatan jaminan kesehatan. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya kemajuan pesat dibandingkan dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) sebelumnya. (IPPP,2018)

Namun pada saat yang sama, ada sejumlah tantangan pembangunan seperti investasi pada perempuan dan anak-anak. Kendala serupa juga terjadi pada pembangunan di Negara-negara Pasifik sehingga pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keterampilan, keterlibatan pemuda dan perempuan perlu di tingkatkan (IPPP, 2018)

Kedua. *Westminster Foundation for Democracy* (WFD), adalah sebuah LSM asal Inggris yang didedikasikan untuk memperkuat demokrasi dan masyarakat terbuka di seluruh dunia. Lembaga ini memiliki beberapa program yang bermitra lebih dari 30 parlemen di seluruh dunia. LSM ini juga bekerja sama dengan masyarakat sipil dan badan pemilu serta lembaga lainnya. (IPPP, 2018).

Senior Program Manager for Asia of Westminster Foundation for Democracy, David Thirlby menjelaskan bahwa WFD sedang mengembangkan strategi keterlibatan yang inklusif dan terkoordinasi untuk memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. WFD telah menyelenggarakan sesi peningkatan kapasitas yang inklusif termasuk *soft skill* dan pelatihan bagi perempuan dan pemuda, serta bekerja sama dengan kelompok advokasi mengenai mekanisme untuk memperkuat keterlibatan dengan parlemen dan pemangku kebijakan dengan fokus utama pada isu kekerasan terhadap perempuan dalam politik dan pengawasan dalam parlemen melalui perspektif gender (IPPP, 2018).

3.2. STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN

Dalam upaya membendung dukungan terhadap gerakan kemerdekaan Papua, penguatan posisi Indonesia terhadap negara-negara kawasan Asia Pasifik Selatan merupakan suatu hal yang sangat penting. Selain meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik Selatan, pemerintah Indonesia juga harus menggunakan strategi diplomasi lainnya. Strategi diplomasi yang dijalankan pemerintah Indonesia didasari tiga dimensi, yaitu manajemen berita, komunikasi strategis dan membangun relasi serta keterkaitannya tiga dimensi tersebut dengan tujuan yang ingin dicapai.

3.2.1. Manajemen Berita

Manajemen berita atau pengaturan informasi pemberitaan merupakan dimensi yang memiliki kaitan erat dengan dinamika opini publik yang mana akan melihat, mengolah dan menilai informasi dalam pemberitaan yang menggambarkan suatu keadaan. Berkat kemajuan teknologi di era saat ini, berita tidak hanya terbatas pada publik domestik saja tetapi berita juga dapat menyebar secara cepat dan masif dari satu negara ke negara lainnya tanpa melihat batasan teritorial. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk melakukan manajemen berita dengan memberikan konten berita sesuai dengan kepentingan nasional untuk menjelaskan suatu isu domestik terhadap publik asing. Dimensi ini kemudian menjadi langkah pemerintah Indonesia untuk meluruskan kesalahan persepsi publik internasional yang dikembangkan oleh Vanuatu dalam beberapa forum internasional. Pemerintah Indonesia melakukan upaya manajemen berita dengan menyampaikan informasi dan data-data terkait Papua melalui berbagai publikasi baik melalui media milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan setiap hari atau minggu. (Sabir, 2018).

Membantah pernyataan dan tuduhan dari negara-negara pendukung OPM terkait isu Papua menjadi hal pertama yang difokuskan pemerintah Indonesia dalam dimensi ini. Seperti yang sudah dijelaskan bab sebelumnya, negara-negara pendukung OPM

seringkali mengangkat isu Papua di berbagai forum internasional seperti MSG, PIF hingga organisasi PBB. Setiap terangkatnya isu tersebut, Indonesia selalu menegaskan bahwa tuduhan tersebut tanpa bukti, bersifat politis dan tidak etis karena secara langsung mengganggu kedaulatan negara lain. Bantahan-bantahan pemerintah Indonesia ini kemudian disiarkan dan dipublikasikan ke berbagai media nasional dan internasional.

Pemberitaan bantahan-bantahan dari delegasi Indonesia di forum internasional kemudian menjadi viral seperti bantahan dari delegasi Rayyanul Sangaji pada Sidang Majelis Umum PBB 2019 dan yang terbaru, bantahan dari delegasi Silvany Pasaribu pada Sidang Majelis Umum PBB 2020. Keduanya di waktu yang berbeda sama-sama menegaskan bahwa Vanuatu terlalu ikut campur dalam urusan negeri Indonesia. Di Sidang Majelis Umum PBB 2020 terbaru Vanuatu melalui Perdana Menteri Bob Loughman kembali mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua. Melalui hak jawabnya, delegasi Indonesia menggarisbawahi bahwa masalah HAM sering digunakan sebagai kedok kekhawatiran Vanuatu dalam mendukung advokasi separatisme Papua. Delegasi Indonesia juga mengungkit soal dukungan PBB kepada Indonesia yang mana Papua dan Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia sejak 1945. Hal tersebut sudah didukung PBB dan komunitas global sejak beberapa dekade lalu yang bersifat final, tak dapat diubah dan permanen (Permana, 2020).

Tuduhan yang dilontarkan oleh negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon menunjukkan pembiasan dan politisasi negatif di Papua yang kemudian dibantah oleh Indonesia. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia meliris sebuah laporan berjudul “No Genocide in West Papua”. Dalam laporan ini, pemerintah Indonesia menjabarkan kondisi Papua dalam bentuk data statistik, fakta-fakta pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, fakta-fakta tentang dinamika politik di Papua, serta perjalanan berdarah kelompok separatis Papua (Sabir, 2018).

Pemerintah juga gencar dalam menginformasikan kemajuan dan pengembangan Papua yang merupakan salah satu kebijakan dalam negeri dibawah pemerintahan

Presiden Jokowi. Tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Trans-Papua, bandara dan pelabuhan laut; pemerintah Indonesia juga mengupayakan pembenahan dan penyesuaian seperti perbaikan kualitas listrik, peningkatan fasilitas perbatasan melalui Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, semua sedang diperbaiki atau diperbaiki, atau bahkan disesuaikan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur serta fasilitas membuat masyarakat lebih mudah untuk beradaptasi dan berinteraksi. Pembangunan berkesinambungan ini diyakini dapat memudahkan distribusi barang yang meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Percepatan pembangunan kesejahteraan di pulau Papua kemudian telah berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua mencapai 63,01 meningkat 0,85 poin (1,37 persen) dan Papua Barat 67,47; meningkat 0,75 poin (1,12 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yaitu berata di rata-rata 62,16 (IPM 2023, Volume 18, 2024). Dengan begitu, penguatan pembertitaan dan penelusuran informasi mempunyai peran penting untuk menghubungkan pemerintah Indonesia dengan publik Global dalam menjelaskan keadaan di Papua. Upaya dan kinerja dari pemerintah tersebut memberikan nilai tambah bahwa masyarakat Papua memang betul-betul diperhatikan dan menjadi bagian dari Indonesia.

3.2.2. Strategi Komunikasi

Diplomasi pada dasarnya adalah tentang komunikasi. Seorang diplomat yang berdiplomasi pada dasarnya mengemban tugas untuk membawa pesan atau informasi untuk dikomunikasikan serta memahami dan membangkitkan konvergensi diantara berbagai macam aktor diplomatik. Komunikasi menjadi bagian penting dari strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan diplomasi. Pada kasus ini, pemerintah Indonesia

melakukan komunikasi strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi publik mengenai isu Papua.

Komunikasi strategis sendiri serupa dengan kumpulan aktivitas yang menyerupai kampanye politik. Saat melakukan komunikasi strategis, seorang aktor harus mempunyai satu pesan yang ingin disampaikan kepada publik dan pesan yang ingin disampaikan tersebut harus terus menerus disampaikan kepada publik hingga publik terpengaruh oleh pesan tersebut (Leonard, 2002). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia ingin mengembangkan sejumlah pesan strategis yang terencana melalui serangkaian acara kepada negara-negara di kawasan Asia Pasifik Selatan. Pesan-pesan strategis itu antara lain bahwa ras Melanesia di Indonesia bukan hanya ada di pulau Papua saja tetapi juga di Maluku dan Timor melalui acara Melanesian Culture Festival dan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi HAM melalui *Bali Democracy Forum*.

3.2.3. Membangun Relasi

Membangun relasi berarti menjalin hubungan jangka panjang dan memangkas jarak, sehingga diharapkan tidak ada jarak sosial antara aktor pelaku dan target dari diplomasi publik. Hubungan yang terjalin ini kemudian dapat menciptakan analisis umum terhadap sebuah isu dan dapat memberikan suatu pemikiran yang lebih jelas pada target yang dituju, terkait motivasi dan faktor aktor pelaku yang menyebabkan mereka melakukan suatu aksi dan diskusi ini akan berjalan di antara para aktor dengan latar yang berbeda. Berbagai kegiatan yang dapat diimplementasikan dalam dimensi ini antara lain melalui pemberian beasiswa, pertukaran pelajar, kegiatan pelatihan (training), seminar atau konferensi, dan akses-akses saluran media lainnya (Leonard, 2002, p. 18).

3.2.4. Bali Demokrasi Forum

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia – setelah Amerika Serikat dan India – menginisiasi sebuah forum yang disebut Bali Democracy Forum

(BDF). BDF diinisiasi sebagai wadah untuk bertukar pengalaman negara-negara yang sedang melakukan demokratisasi. Melalui BDF, Indonesia bisa menjadi aktor penting yang tidak hanya berpengaruh, tetapi juga berkontribusi dalam mempromosikan demokrasi di mata dunia. Sebagai elemen diplomasi, sudah selayaknya berbagai keberhasilan demokrasi dan HAM pada Indonesia diutilisasi secara optimal sehingga membangun citra positif Indonesia dan terutama untuk mencapai kepentingan nasional. Maka dari itu, acara ini digunakan untuk menyampaikan pesan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Pasifik yang secara tidak langsung digunakan untuk menjawab tuduhan-tuduhan OPM.

Dalam BDF, Indonesia turut mengundang negara-negara Pasifik sebagai sebuah langkah pendekatan dan komunikasi untuk mengubah pemikiran negatifnya terhadap Indonesia. Dari 2018 hingga 2023, tercatat setiap Negara-negara kepulauan pasifik termasuk Sekretariat MSG hadir dalam agenda tersebut (Lihat Tabel 3.1.)

tabel 3,2 1 : Rekapitulasi data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Negara	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fiji	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir
Papua Nugini	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir
Kepulauan Solomon	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir
Vanuatu	hadir	tidak hadir	hadir	hadir	hadir	hadir
Samoa	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir
Tonga	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir
Tuvalu	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir
Palau	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir
Secretariat MSG	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir

Sumber: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa kehadiran mereka memberikan konsekuensi yang memungkinkan mengurangi intensitas dukungan terhadap Isu Papua Merdeka. Hal ini dikarenakan salah satu pembahasan dalam BDF ialah mengenai penguatan kapasitas demokrasi antar negara, khususnya untuk memiliki komitmen yang tegas dalam menghargai kedaulatan antar negara. BDF menekankan pentingnya kesetaraan, dialog yang bersifat membangun, saling menghargai dan memahami untuk mencapai kerjasama demokrasi. Dengan demikian, Indonesia menjadi pemain penting dalam mempromosikan demokrasi di Asia Pasifik. Melalui BDF, Indonesia dapat memberi ruang komunikasi bagi Negara-negara Kepulauan Pasifik untuk saling berdiskusi dan melibatkan partisipasi kerjasama regional.

BDF merupakan salah satu elemen diplomasi publik Indonesia dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Diplomasi publik Indonesia ini dijadikan ajang unjuk gigi keadaan demokrasi dan HAM di Indonesia yang dimulai dari era SBY hingga era Jokowi saat ini. Meski BDF belum memiliki hasil kesepakatan yang terukur dikarenakan masih sebatas forum sharing experience bukan forum untuk menghasilkan kesepakatan yang mengikat, BDF ini melahirkan konsekuensi moral, politik dan hukum bagi negara yang ikut hadir. Pelaksanaan BDF selanjutnya juga dapat membantu strategi diplomasi publik Indonesia dengan memberikan kesempatan MSG untuk semakin terlibat dalam kerjasama regional.

Hal ini terlihat saat BDF berperan sebagai sarana dalam mempertemukan dan meningkatkan hubungan negara anggota MSG. Seperti pada BDF VI tahun 2013, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saat itu, secara khusus mengadakan pertemuan untuk negara anggota MSG yang hadir, yaitu Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon serta Sekretaris Jenderal MSG Peter Forau terkait dengan undangan kunjungan negara anggota MSG untuk melihat keadaan Indonesia secara langsung (Ministry of Communications of Fiji, 2013).

Ataupun yang terbaru pada BDF XII tahun 2019, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Kepulauan Solomon Jeremiah Manele di sela-sela BDF. Keduanya menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan (Framework on Development Cooperation) antara Indonesia-Kepulauan Solomon serta menyaksikan penandatanganan perjanjian hibah (Grant Agreement) Pembangunan Lapangan Futsal Multifungsi untuk pelaksanaan Pacific Games 2023 di Kepulauan Solomon (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Hal ini serupa dengan diadakannya pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbink Pato di sela-sela BDF XI tahun 2018. Indonesia dan Papua Nugini sepakat untuk meneruskan kerja sama dalam memperkuat hubungan bilateral, terutama di bidang ekonomi. Kesepakatan ini bahkan ditanggapi dengan dukungan terbuka dari Papua Nugini terkait dengan Papua (Nugraha, 2018)

3.2.5. Melanesian Cultur Festival

Pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui acara ini cukup strategis. Hal ini untuk mengimbangi kampanye yang dilakukan oleh kelompok Papua merdeka dan negara-negara pendukungnya yang memanfaatkan solidaritas ras Melanesia sebagai narasi dan mengklaim sebagai satu-satunya ras Melanesia di wilayah NKRI sehingga secara ras dan budaya berbeda dan bukan bagian dari bangsa Indonesia (Putra, Legionosuko, & Majid, 2019).

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa Melanesia terbesar di dunia, bukan Papua Nugini, Fiji, Kaledonia Baru, maupun Nauru. Tercatat bahwa jumlah masyarakat ras Melanesia di Indonesia mencapai sekitar 13 juta orang – atau 40,9% dari total jumlah penduduk Melanesia di 20 negara/teritori di kawasan Asia Pasifik Selatan yang berjumlah total sekitar 31 juta orang yang terkonsentrasi di 5 provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). Dengan menggunakan pedoman “Bhinneka Tunggal Ika”, Indonesia berusaha

menunjukkan kepada negara-negara Melanesia mengenai keragaman Indonesia yang salah satunya merupakan identitas Melanesia.

Penyampaian pesan strategis tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan langkah pertama yaitu penandatanganan „Naskah Piagam Deklarasi Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia“ oleh Gubernur Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 6 Oktober 2015 di Ambon, Maluku. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) pada tanggal 28 Juni 2016. Dikeluarkannya Permendagri tersebut semakin menguatkan kampanye pemerintah Indonesia dimana dasar tujuan FPMMI adalah sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksinya masyarakat Melanesia dan juga sebagai wadah untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melanesia Indonesia (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017).

Selain pengukuhan identitas Melanesia di Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Melanesia, pemerintah Indonesia menyelenggarakan *Melanesian Culture Festival* yang dilaksanakan pada 26-30 Oktober 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. *Melanesian Culture Festival* merupakan acara rutin MSG yang diadakan setiap empat tahun sekali yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa Melanesia. Sebelumnya, Indonesia juga pernah berpartisipasi di festival yang sama yang diselenggarakan di Papua Nugini pada tahun 2014. Indonesia pada saat itu diwakili oleh Provinsi Papua yang membawa tim tari dari Jayapura dan Kabupaten Keerom dan memamerkan potensi Papua seperti buah merah dan batik Papua, sekaligus menjadi tamu kehormatan pada acara pembukaan.

3.2.6. Pemberian Beasiswa

Indonesia melalui institusi pemerintahannya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Luar Negeri, telah berupaya memperkuat soft power-nya melalui diplomasi publik dalam bentuk beasiswa untuk memperkuat pengaruhnya menjadi aktor penting dalam percaturan politik di tingkat regional dan global. Pemberian beasiswa dan mobilitas pelajar internasional merupakan elemen penting dalam aktivitas diplomasi publik suatu negara. Hal ini terutama berkaitan dari tujuan program yaitu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa asing untuk datang dan melihat secara langsung negara Indonesia dan mendapatkan kesan positif untuk kemudian disampaikan kembali ke negara mereka masing-masing. Beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing antara lain Darmasiswa, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) serta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI). (Lihat tabel 3.2.6)

tabel 3,2 2: Rekapitulasi Data Penerima Beasiswa Dari Indonesia

Tahun	Negara	Total anggaran
2019	Papua Nugini	1,35 triliun rupiah
	Vanuatu	
	Salomon Island	
	Fiji	
2020	Papua Nugini	1,50 triliun rupiah
	Vanuatu	
	Salomon Island	
	Fiji	
2021	Papua Nugini	1,50 triliun rupiah
	Vanuatu	

Sumber : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Seperti di Papua Nugini, yang mana dalam kurun waktu lima tahun terakhir mempunyai partisipasi penuh dan jumlah mahasiswa terbanyak di antara lainnya, telah mendirikan Indonesian Language and Multimedia Center yang terletak di St. Joseph's International Catholic College dan Indonesian Corner di Lions Morata Vocational Training Center. Pada 2018, untuk pertama kalinya, Bahasa Indonesia juga resmi diajarkan secara formal di Sekolah Menengah Lae di provinsi Morobe, Papua Nugini, dengan gurunya Fred Ogia yang pernah studi dan lulusan dari UNIKOM, Bandung, Indonesia. (Wijaya & Wayne, 2018).

Lalu di Fiji, alumni-alumninya selalu berpartisipasi dalam membantu dan mempromosikan budaya Indonesia di negara asalnya. Seperti penyelenggaraan "Workshop on Batik and Bamboo Weaving" oleh Kuasa Usaha Ad-interim (KUI) RI Suva dibantu oleh para alumni yaitu Katarina Ligaitamana dan Loraini Saqasaqaivala, yang bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat Fiji.

Sedangkan dari Kepulauan Solomon, para alumninya berbagi cerita dan pengalaman seputar masa studinya di Indonesia. Seperti Erika Anderson, yang mengambil studi Bahasa Indonesia di Universitas Soedirman periode 2019/2020, menjelaskan bahwa Darmasiswa memberikan kesempatan terhadap dirinya untuk belajar menghormati, merangkul dan membangun ulang perspektifnya mengenai perbedaan dan keragaman budaya. Erika Anderson ingin berbagi dan meneruskan semua pengetahuan yang dipelajari selama masa studi di Indonesia ke negara asalnya dan berharap bahwa Darmasiswa dapat terus menjembatani dan mengapresiasi budaya antara Indonesia dan negara-negara yang berhubungan diplomatik di tahun-tahun selanjutnya (Universitas Soedirman, 2020). Untuk menekankan keberhasilan program ini agar dapat benar-benar terasa dan dirasakan semua pihak, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di setiap negara juga mengadakan forum alumni Darmasiswa RI secara berkala.

Menyadari kontribusi program yang signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di negara anggota GNB, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperluas cakupan dan menambah jumlah beasiswa yang ditawarkan. Pemerintah Indonesia kemudian menawarkan beasiswa ini, tidak hanya ke negara anggota GNB, tetapi juga ke negara-negara berkembang termasuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik Selatan seperti Fiji, Papua Nugini, Solomon dan Vanuatu, sehingga beasiswa GNB digantikan menjadi beasiswa KNB.

Beasiswa KNB, yang sekarang dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, menawarkan beasiswa program magister sebanyak 53 jurusan di 16 universitas terbaik di Indonesia. Selain berkontribusi pada pengembangan SDM negara berkembang, Beasiswa KNB juga bertujuan meningkatkan *cultural understanding* dan memperkuat hubungan serta kerja sama antara negara-negara berkembang. Sejak 2009 hingga 2017, Indonesia telah memberikan 992 beasiswa kepada siswa yang datang dari 71 negara berkembang di seluruh dunia (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2017).

Kegiatan Darmasiswa dan Beasiswa KNB pada dasarnya merupakan bentuk upaya diplomasi yang positif untuk mengenalkan bahasa, seni, budaya dan toleransi Indonesia yang mengacu pada *Bhinneka Tunggal Ika* kepada masyarakat internasional. Melalui *people-to-people-contact*, Indonesia berharap para alumni juga akan memperkenalkan keragaman Indonesia sehingga membuka jendela atau pemikiran masyarakat di negara asal tentang Indonesia yang dekat dengan mereka serta mau memberikan suara untuk Indonesia di masa mendatang. Hal ini terlihat saat Fiji dan Papua Nugini yang memberikan dukungan terbuka untuk Indonesia di forum- forum internasional yang dijelaskan di bab sebelumnya.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengelolah Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), dimana 72 peserta terpilih akan tinggal selama tiga bulan di tengah masyarakat Indonesia yang terbagi di enam kota yakni, Yogyakarta, Bali, Makassar, Padang, Kutai Kartanegara dan Banyuwangi. Para peserta akan belajar di

sanggar seni dan budaya untuk mempelajari Bahasa Indonesia, seni budaya, adat istiadat dan kearifan lokal sesuai dengan kota yang ditempatkan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Guna meningkatkan people-to-people-contact, Indonesia juga melibatkan peserta yang berasal dari lima pulau terbesar Indonesia. Melalui people-to-people-contact membuat interaksi antar peserta semakin intensif sehingga terjadi pertukaran kebudayaan diantara delegasi kebudayaan dalam membina hubungan satu sama lain. Hal ini kemudian memungkinkan peserta masing-masing mengetahui pandangan satu sama lain dengan cara yang damai. Pada akhirnya program menjadi sarana untuk menumbuhkan kerjasama, yang muncul dari kontak langsung dan berbagi budaya di antara orang-orang yang terlibat dalam program, yang mengarah ke hubungan diplomatik yang berkembang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, BSBI menjadi alat baru bagi diplomasi Indonesia dengan menggunakan seni dan budaya.

3.2.7. Pemberian Bantuan Moneter

Indonesia juga turut memberikan bantuan kemanusiaan, terutama di saat negara-negara di kawasan ini dilanda bencana alam, sebagai bentuk solidaritas sebagai warga dunia dan bangsa Pasifik.¹⁷ Selain itu, di tahun 2019, Indonesia meresmikan “Indonesia AID” yang diadopsi sebagai perangkat diplomasi untuk memperkuat kontribusi dan peran Indonesia di dunia internasional. Indonesia AID merupakan program bantuan luar negeri Indonesia yang rencananya akan menyisihkan dana dalam dana abadi yang akan didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan di Kepulauan Pasifik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program dalam bidang pengembangan usaha, yaitu “International South Pacific - Indonesia Entrepreneurship Camp: Sharing Experience to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) 2019” yang ditujukan kepada 21 pelaku bisnis dari negara-negara di kawasan Pasifik, termasuk Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Indonesia juga

melaksanakan “Pacific Exposition 2019” yang bertujuan untuk menguatkan kolaborasi pariwisata dan bisnis diantara negara-negara Pasifik, termasuk diantaranya Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Bantuan-bantuan dibawah kerangka KSST tersebut membuka peluang bagi Indonesia dalam meningkatkan perannya di dunia internasional maupun kawasan regional, khususnya di Asia Pasifik Selatan. Kerjasama ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam implementasi wujud kebijakan luar negerinya terhadap hubungan dengan Asia Pasifik Selatan. Indonesia berupaya mengembangkan konektivitas di kawasan Pasifik Selatan sebagai usaha mendapat dukungan dari negara-negara di kawasan ini dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari aktivis-aktivis gerakan separatis Papua. Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan ke beberapa negara Kepulauan Pasifik antara tahun 2019 hingga 2023. (lihat tabel 3.2.7).

tabel 3,2 3 : Data negara penerima bantuan dari indonesia

Negara	Tahun	Peruntukan	Jumlah total
Papua Nugini	2019	Bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan	USD 1.500.000
Vanuatu	2019	Bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan	USD 750.000
Tonga	2020	Bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan	USD 450.000
Samoa	2020	Bantuad darurat dan bantuan kemanusiaan	USD 300.000
Fiji	2020	Bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan	USD 150.000
Kiribati	2020	Bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan	USD 80.000

Tuvalu	2021	Bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan	USD 45.000
--------	------	---	------------

Sumber : Indonesia's International Development Cooperation" by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 2023

Secara total, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan lebih dari USD 3 juta ke negara-negara Kepulauan Pasifik selama periode 2019-2023. Indonesia telah memberikan bantuan manusia sejak 2019 hingga 2023 kepada beberapa negara Kepulauan Pasifik, dengan total lebih dari USD 3 juta. Bantuan tersebut termasuk bantuan bencana darurat dan bantuan manusia tambahan untuk negara-negara seperti Papua Nugini, Vanuatu, Tonga, Samoa, Fiji, Kiribati, dan Tuvalu. Jumlah bantuan yang diberikan ke masing-masing negara berbeda-beda dari USD 15,000 hingga USD 1 juta. (Indonesia's International Development Cooperation" by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 2023)

3.3. LANGKAH-LANGKAH KONKRET YANG DI LAKUKAN OLEH PARLEMEN INDONESIA.

Dalam diplomasi parlemen, hubungan Indonesia dengan negara di kepulauan pasifik dimulai dengan proses yang panjang. Sebelum hubungan multilateral antar parlemen Negara-negara pasifik dimulai, hubungan diplomasi melalui berbagai level telah tercipta. Hubungan yang terjalin di berbagai level sebelumnya, menciptakan dampak bagi keberlangsungan diplomasi parlemen antar negara-negara.

Hubungan diplomatik yang dibangun oleh Diplomat Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menciptakan atmosfer persahabatan yang baik. Upaya Kementerian Luar Negeri melalui Bali Democracy Forum untuk menciptakan platform berdiskusi mengenai demokrasi akhirnya juga berpengaruh menciptakan keleluasaan hubungan diplomatik antar parlemen kedua negara (Liza, 2024)

Secara substansi, parlemen Indonesia sangat aktif mengingatkan dampak perubahan iklim khususnya bagi negara-negara di kawasan pasifik. Melalui Indonesia Pacific Parliamentary Partnership, parlemen Indonesia berhasil menciptakan pandangan yang searah tentang dampak perubahan iklim. Parlemen Indonesia melakukan pendekatan dalam aspek ekonomi, sehingga luaran atau output dari pertemuan ini tidak hanya berupa peringatan dampak dari perubahan iklim tetapi juga strategi ekonomi yang berdampak baik bagi lingkungan dan berkelanjutan (Liza, 2024)

Pertemuan kerja sama yang diinisiasi oleh Indonesia dan melibatkan negara-negara pasifik ini menghasilkan 9 poin kesimpulan berupa kesamaan dan kesepakatan pandangan diantaranya: **Pertma**, Menegaskan keyakinan tentang pentingnya kontentivitas regional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan, mendorong kerja sama dan integrasi regional, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam urusan internal masing-masing negara. Seluruh negara yang hadir juga setuju untuk membuka lebih banyak hubungan ekonomi untuk memahami potensi wilayah. **Kedua**, Seluruh negara menyambut baik komitmen Indonesia untuk memberikan dukungan dalam hal bantuan teknis berupa berbagai program peningkatan kapasitas sebagai bagian dari kerja sama antar parlemen. **Sebagai bukti nyata dari poin diatas adalah dengan hadirnya berbagai bantuan yang di berikan oleh Negara Indonesia kepada negara-negara di kepulauan pasifik.**

Ketiga, Mengakui laut sebagai identitas bersama yang sangat penting bagi masa depan bersama dan kemanusiaan bersama dalam segala keberagamannya. Seluruh negara menegaskan kembali komitmen untuk melestarikan dan menjaga laut dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan sebagai milik bersama secara global. Seluruh negara menyatakan keprihatinan terhadap segala jenis polusi laut, plastik dan plastik mikro, polusi nutrisi, air limbah tanpa pengolahan. Seluruh negara menyerukan tindakan bersama yang dapat mengurangi sampah laut dari kegiatan berbasis lahan.

Keempat, Seluruh Negara menyatakan kekhawatiran terhap dampak buruk dari perubahan iklim terhadap lautan dan masyarakat di negara berkembang. Seluruh negara menyadari pentingnya Perjanjian Paris dan mendesak seluruh negara peserta untuk

mengambil tindakan yang lebih besar dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengimplementasikan isi dari Paris Agreement (Perjanjian Paris).

Kelima, Seluruh Negara menyampaikan keprihatinan serius atas meningkatnya risiko penangkapan ikan yang berlebihan dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan meskipun ada upaya di seluruh dunia untuk mempromosikan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, negara peserta berbagi pandangan bahwa penangkapan ikan ilegal, tanpa regulasi, dan tanpa laporan perlu dicegah dan dihilangkan untuk memastikan keberlanjutan laut. **Keenam,** Fokus pada pemberdayaan perempuan di kawasan, negara-negara mengapresiasi kemajuan yang di capai oleh Indonesia dan Negara-negara di kawasan pasifik dalam hal keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan serta pemenuhan hak-hak perempuan serta berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dalam mengawal pembangunan.

Keujuh, Menegaskan kembali tentang pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dan berkomitmen untuk mengalokasikan dukungan yang diperlukan. Sebagai bukti nyata dan komitmen dari poin ini, Indonesia telah bekerja sama dengan Negara-negara di kepulauan pasifik dalam hal bidang pendidikan yaitu dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ingin berstudi di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM. **Kedelapan,** Seluruh anggota parlemen untuk terlibat di masa depan dan setuju untuk menjajaki inisiatif baru dalam program kerja sama antar-parlemen, termasuk melalui berbagai bantuan teknis dukungan parlemen seperti seminar, lokakarya dan program lainnya yang bertujuan untuk memperkuat dialog antara Indonesia dengan Negara-negara Kepulauan Pasifik. Dan yang **terakhir,** seluruh peserta membarikan apresiasi kepada DPR RI yang telah menyelenggarakan forum bersejarah ini.

3.3.1. Manfaat dari Diplomasi Parlemen

Parlemen Indonesia melakukan pendekatan ekonomi sebagai langkah penyelesaian masalah yang dihadapi bersama oleh negara pasifik dalam pertemuan parlemen negara pasifik IPPP pada 2018 lalu. Inisiasi kerja sama ini merupakan sebuah proses diplomasi yang linear antar Indonesia dan negara-negara pasifik. Upaya pemerintah Indonesia

untuk mempromosikan demokrasi berdampak baik, dibuktikan dengan terbukanya Negara-negara pasifik terhadap diplomasi parlemen yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia. Kepercayaan yang dibentuk melalui hubungan diplomatik yang panjang juga berdampak baik bagi implementasi resolusi dari *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP).

Salah satu manfaat dari diplomasi parlemen Indonesia dalam Forum *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* pada Juli 2018 dapat dilihat ketika pemerintah Fiji mengeluarkan kebijakan nasional untuk menghadapi perubahan iklim pada Januari 2019 (*Republic of Fiji National Climate Change Policy*). Beberapa poin dalam kebijakan nasional Fiji yang linear dengan kesepakatan yang dihasilkan dari *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP), antara lain: **Pertama** Strategi yang dibangun pemerintah Fiji untuk memanfaatkan platform nasional, regional, dan Internasional untuk menciptakan dan mempromosikan inisiatif untuk mengurangi polusi laut dan plastik, serta peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon biru.

Kedua, Pemerintah Fiji dalam *Republic of Fiji National Climate Change Policy* mengakui dengan tegas adanya dampak antropogenik yang merugikan lautan akibat eksploitasi perikanan yang berlebihan, polusi laut, plastik, degradasi lahan, dan praktik pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan. **Ketiga**, Pemerintah Fiji dalam *Republic of Fiji National Climate Change Policy* mengesahkan komitmennya terhadap Perjanjian Paris dalam hukum nasional. Yang selanjutnya menciptakan landasan hukum kuat untuk menghasilkan insentif ekonomi dan mekanisme penegakan hukum yang diperlukan untuk mengurangi resiko perubahan iklim di seluruh negeri dan meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk adaptasi, transformasi, dan mitigasi dampak gas rumah kaca.

Selain dalam *Republic of Fiji National Climate Change Policy*, Fiji juga mengimplementasikan poin kesepakatan dari IPPP melalui *Blue Prosperity Programme* yang diresmikan pada 2021 dengan tujuan untuk keamanan laut, serta ketahanan ekonomi nasional Fiji. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi, Perikanan,

dan Lingkungan Hidup Fiji bersama dengan Waitt Institut, sebagai upaya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Program ini berbasis pada ilmu pengetahuan, kolaborasi, dan konsultatif dengan masukan dari lembaga pemerintah, masyarakat sipil, pemangku kepentingan, LSM, pakar kelautan, dan individu. Program ini sejalan dengan komitmen yang dibangun Fiji dalam IPPP yaitu upaya untuk menciptakan keberlangsungan laut melalui peningkatan regulasi di bidang perikanan untuk mencegah penangkapan yang berlebih (Liza, 2024).

3.3.2. Tujuan Diplomasi Parlemen Indonesia Terhadap Negara-Negara Kawasan Asia Pasifik Selatan

Setelah dimensi-dimensi tersebut dijalankan maka selanjutnya akan mendapatkan sebuah hasil/tujuan dari diplomasi tersebut.: (1) adanya peningkatan rasa kekeluargaan masyarakat dari negara lain dengan Indonesia; (2) peningkatan penghargaan masyarakat dari negara lain terhadap Indonesia; (3) pelibatan masyarakat dari negara lain dengan program/aktivitas yang diseleenggarakan Indonesia; dan (4) mempengaruhi masyarakat dari negara lain.

Dalam dinamikanya, selama dijalkannya diplomasi parlemen ini, penulis menilai bahwa Indonesia telah mencapai pada tahap terakhir, walaupun sebenarnya belum seratus persen sepenuhnya tercapai. Tahap pertama ditandai dengan terpenuhinya indikator seperti meningkatnya pengetahuan publik Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan Papua Nugini tentang Indonesia serta adanya perbaikan citra, opini, informasi dan persepsi negatif Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui publikasi di berbagai media massa yang telah dijelaskan pada dimensi manajemen berita dan pengembangan narasi bahwa ras Melanesia di Indonesia bukan hanya etnis Papua tetapi juga mencakup etnis Maluku dan Timor (NTT) melalui Festival Melanesia dan BDF pada dimensi komunikasi strategis. Selain itu, kegiatan diplomasi parlemen Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk mencapai tahapan ini adalah terbentuknya *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) dimana secara langsung memperkenalkan Indonesia kepada anggota-anggota kawasan Pasifik Selatan.

Pada tahap kedua, dalam meningkatkan persepsi yang positif dari masyarakat negara yang dituju, upaya diplomasi parlemen yang dilakukan Indonesia adalah dengan memberikan bantuan-bantuan seperti bantuan kemanusiaan terhadap Negara-negara Pasifik Selatan, ataupun bantuan berupa program pengembangan kapasitas, program pelatihan ataupun bantuan alat-alat kepada Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan Papua Nugini dibawah kerangka KSST. Bantuan luar negeri tersebut menitikpkan pesan bahwa Indonesia memiliki rasa kepedulian dan solidaritas terhadap negara-negara dengan rumpun Melanesia. Meski begitu, sebenarnya persepsi dari Vanuatu tentang Papua belum berubah sepenuhnya menjadi positif meskipun strategi manajemen berita dan komunikasi strategis telah diupayakan Indonesia. Upaya mengubah persepsi mengenai isu Papua lantas menjadi tantangan sendiri dalam implementasi diplomasi parlemen Indonesia kedepannya.

Pencapaian diplomasi Parlemen Indonesia pada tahap ketiga yaitu pelibatan masyarakat negara tujuan dalam aktivitas yang diselenggarakan pemerintah dapat dilihat melalui dimensi pembangunan relasi. Pada tahap ini dapat dilihat melalui pemeberian beasiswa yang konsisten terhadap Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan Papua Nugini seperti Darmasiswa, KNB dan BSBI. Selain itu ada juga berbagai program pelatihan kerjasama teknis seperti pelatihan dan workshop yang ditujukan untuk negara-negara Pasifik Selatan. Pada tahap ini menghasilkan peningkatan kerja sama di berbagai bidang dan pengenalan Indonesia lebih jauh lewat pendidikan dan pariwisata.

Pada tahap terakhir yaitu keberhasilan dalam mempengaruhi masyarakat di negara sasaran, penulis menilai bahwa pencapaian dalam tahapan ini belum sepenuhnya tercapai. Pencapaian hubungan antara Indonesia dengan Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan Papua Nugini dapat dilihat dari peningkatan kerjasama yang telah terjalin di berbagai bidang serta partisipasi konsisten dari masing-masing negara terhadap program/aktivitas yang diselenggarakan Indonesia. Pencapaian dalam tahapan ini dapat

dibuktikan dengan dukungan terbuka dari Papua Nugini dan Fiji di forum-forum terbuka dan penangguhan penerimaan anggota pro- kemerdekaan Papua.

Meski begitu, Vanuatu tetap menunjukkan kecenderungan untuk mendukung upaya memerdekakan Papua yang dapat dilihat dalam sejumlah forum seperti MSG, PIF dan PBB yang masih mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua yang menyudutkan Indonesia. Dengan adanya kecenderungan ini, penulis menilai bahwa dari keempat tahap pencapaian diplomasi parlemen diatas, terlihat bahwa strategi diplomasi Indonesia baik melalui manajemen berita, komunikasi strategis maupun pembangunan relasi terhadap masyarakat Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan Papua Nugini belum sepenuhnya mampu membuat publik Vanuatu memihak dan mendukung sikap politik Indonesia. Namun, hal ini bukan berarti strategi diplomasi parlemen yang dijalankan Indonesia gagal. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa negara-negara sasaran selain Vanuatu, secara konsisten memberikan dukungan terbuka kepada Indonesia. Selain itu, strategi diplomasi parlemen Indonesia masih berjalan selama masih adanya hubungan diplomatik dan juga kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sasaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam meningkatkan hubungan antara negara, strategi parlemen Indonesia ditujukan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan negara-negara lainnya. Namun dalam kasus ini, strategi diplomasi parlemen ditujukan khusus untuk membendung upaya negara-negara pasifik dalam membicarakan isu Papua di tingkat regional maupun Internasional. dengan menggunakan konsep Multi Track Diplomacy oleh Jhon W. McDonald dan Dr. Louise Diamond, penulis menganalisa bagaimana Indonesia melakukan diplomasi parlemen terhadap negara-negara kawasan pasifik selatan terkait isu Papua Merdeka. Dengan mengklasifikasi langkah pemerintah Indonesia menjadi beberapa unsur, yaitu manajemen berita, strategi komunikasi, membangun relasi, serta keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pada unsur pertama, strategi diplomasi parlemen Indonesia dapat dilihat dari bagaimana pemerintah Indonesia (*Government*) memanfaatkan media dan sarana berita lainnya dalam manajemen berita. Melalui media, Indonesia menyebarkan melakukan penyebaran informasi dan berita terkait dengan sejumlah keberhasilan yang telah dibangun di Papua, serta mengkonter informasi-informasi yang bermuarah pada mis persepsi negara-negara luar dan dunia internasional tentang Isu Papua. Indonesia juga merilis fakta-fakta dan laporan tentang kondisi Papua sebagai bantahan atas tuduhan OPM dan Negara-negara yang mendukung Isu Papua Merdeka. Unsur ini bertujuan untuk meluruskan informasi dan persepsi yang telah dibangun oleh OPM terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Pada unsur kedua yaitu *media and Publik opinion*. setelah meluruskan kesalahan informasi dan persepsi terkait Papua, pemerintah Indonesia kemudian mencoba membangun narasi baru. Bahwa ras Melanesia di Indonesia bukan hanya ada di Papua tetapi juga di Maluku dan Timor melalui acara *Melanesian Culture Festival* dan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM melalui *Bali Democracy Forum*. Unsur ini bertujuan untuk

melawan gerakan yang dilakukan oleh OPM dengan memanfaatkan pendekatan identitas Melanesia dan pelanggaran HAM yang bertujuan untuk menggalang dukungan dari negara-negara Melanesia dan dunia Internasional.

Pada dimensi terakhir yaitu *research and Publik Educatoin* dengan memanfaatkan instrumen kerja sama, Indonesia mencoba membangun relasi jangka panjang dengan negara-negara di kawasan pasifik selatan. Melalui pemberian beasiswa kepada negara-negara Pasifik diharapkan dapat terjadinya peningkatan citra Indonesia yang positif di mata dunia, khususnya negara-negara di kawasan Pasifik selatan. Hal ini dikarenakan pada dimensi ini menggunakan *people to people contacta* atau melibatkan masyarakat secara langsung seta menjadi alat diplomasi untuk menunjukkan seni dan budaya seras menunjukkan sisi positif dari negara Indonesia terhadap Isu Papua.

Setelah unsur-unsur tersebut dijalankan, maka selanjutnya akan mendapatkan sebuah hasil dan tujuan dari diplomasi parlemen tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Jhon W. McDonald dan Dr. Louise bahwa terdapat beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan adanya diplomasi parlemen. (1) adanya peningkatan rasa kekeluargaan masyarakat dari negara lain dengan Indonesia. (2) peningkatan penghargaan masyarakat dari negara lain terhadap Indonesia. (3) pelibatan masyarakat dari negara lain dengan program dan aktifitas yang diselenggarakan oleh negara Indonesia. Dan yang terakhir (4) dapat mempengaruhi masyarakat dan dunia internasional.

Satu hal yang perlu di garisbawahi, bahwa diplomasi parlemen merupakan strategi politik jangka panjang dan bukan sesuatu hal yang terjadi secara cepat dan instan. Mungkin dalam kurun waktu lima tahun terakhir ada beberapa keberhasilan yang telah diraih oleh Indonesia seperti dukungan terbuka dari Fiji dan Papua Nugini dan Negara kepulauan Pasifik lainnya tidak termasuk Vanuatu di forum-forum tingkat regional maupun Internasional dalam hal dukungan terhadap status kedaulatan Indonesia atas Papua. Akan tetapi, potensi dan peluang

Diplomasi parlemen Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik selatan masih terbuka lebar karena telah terakomodir dalam berbagai forum-forum parlemen Internasional terkhusus IPPP sehingga besar kemungkinan akan tercapainya tujuan diplomasi parlemen.

5.2. Saran

Ilmu pengetahuan memiliki sifat yang terbuka dan dinamis. Dalam penelitian yang terfokus pada Diplomasi Parlemen DPR RI Terkait Isu Papua Merdeka dalam Forum *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat dikembangkan lagi untuk guna menambah khazanah ilmu pengetahuan kedepannya.

Melalui ksripsi ini, penulis berharap bahwa strategi diplomasi parlemen Indonesia tidak hanya terfokus pada aktor-aktor seperti negara dan pemerintah saja, tetapi juga aktor non-Negara seperti organisasi non-pemerintah dan aktor lainnya diluar pemerintah juga ikut serta terlibat. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan masyarakat luas sebagai pengetahuan dan bahan informasi seputar diplomasi parlemen

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, U. *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (III). Pustaka Pelajar, 2019.
- Barston, R. P. *Modern Diplomacy*. Fifth. New York, 2019.
- Berridge, G. R. *Diplomacy: Theory and Practice*. Fourth. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Buku Panduan Anggota BKSAP 2019-2024*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019.
- Chair"s Summery Indonesia Pasifik Parliamentary Partnership, *Human Development and Msritime Sustainability*, 23-24 juli, 2018.
- Dadang Ilham K. Mujiono, Frisca Alexandra. *Multi Track Diplomacy : Teori Dan Studi Kasus*. Edited by Uni W. Sagena. 2019th ed. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.
- Emila, Ranny, *Praktek Diplomasi*. Jakarta: Bandouse Media, 2013
- Erdianto, K. (2018, February 2). Dua Negara di Pasifik Selatan Dukung Pembangunan dan Penegakan HAM di Papua. Retrieved July 28, 2024 from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/06450821/dua-negara-di-pasifik-selatan-dukung-pembangunan-dan-penegakan-ham-di-papua?page=all>
- Fadli Zoo, wawancara 25, Juni 2024
- Firdaus, Muhammad Jullyo Bagus dan Megahnanda Alidyan Kresnawati "Indonesia Parliamentary Diplomacy: The Leadership of House Representatives Republic of

Indonesia in ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2011-2012” *Wiyama* 2, No 02 (2021):39-47

Hage, Per dan Frank Harary. 1996. *Island Networks: Communication, Kinship, and Classification Structures in Oceania*. Cambridge University Press.

Hamid, Zulkifli. 1996. *Sistem Politik Pasifik Selatan*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Hill, Christopher. *The Changing Politics of Foreign Policy*. Cambridge: Palgrave Macmillan, 2003. https://books.google.co.id/books/about/The_Changing_Politics_of_Foreign_Policy.html?id=tb5KS-OY9iwC&redir_esc=y.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230829133617-113-991832/daftar-negara-pasifik-yang-pernah-nyatakan-dukung-papua-merdeka/2>. Diakses 13 jul. 24 2024

Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Vanuatu Terkait Dengan Pernyataan Vanuatu Mendukung Organisasi Papua Merdeka (Opm) Vol. 10 No. 5 (2022):

Humas. (2015, May 12). Kunjungi Port Moresby, Presiden Jokowi Sebut Papua Nugini Sebagai Tetangga Penting. Retrieved July 28, 2024, from Sekretariat Kabinet RI: <https://setkab.go.id/kunjungi-port-moresby-presiden-jokowi-sebut-papua-nugini-sebagai-tetangga-penting/>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, July 11). Semua Berawal dari Persahabatan: Melalui Pacific Exposition 2019, RI Ciptakan Momentum Pasifik. Retrieved October 8, 2020, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia:

Lamont, Christopher. *Research Methods in Politics and International Relations*. London: Sage Publication, 2015.

- Laporan dan Rekomendasi Panitia Kerja Sama Kawasan Pasifik, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020.
- Lawson, Stephanie. 2003. "Security of Oceania: Perspectives on the Contemporary Agenda", in *Security in the Oceania in the 21st Century*. Honolulu: Asia-Pacific Centre for Security Studies.
- Leonard, M. (2002). *Public Diplomacy*. London: The Foreign Policy Centre.
- Liza Faizah Rizqiah dan Agussalim Burhanuddin, Peran diplomasi parlemen indonesia dalam upaya membantu fiji menghadapi tantangan keamanan lingkungan. Vol 2, No 1 (2024)
- Makareta Komai, "Fiji's Foreign Policy and the New Pacific Diplomacy", *The New Pacific Diplomacy*, (2015).
- Malamud, Andres, Stelios Stavridis, Gilberto Aranda Bustamante, and Jorge Riquelme Rivera. "Parliaments and Parliamentarians." *Polis (Santiago)* 10, no. 28 (2009): 3–16.
- Marie Claude Smouth, *The New International Relations : Theory and Practice*, Hurst Company, London, 2001, hal.78.
- Montar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta LP3ES 1990.
- Muhamad, Simela Victor. "DPR RI Dan Isu Palestina" *Kajian*. Vol. 19, 2014. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/549>.
- Muhammad Sutomo, Ahmad G. Dohamid dan Fauzia Gustarina Cempaka Timur yang berjudul Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Peningkatan Informasi Isu Papua Merdeka Tahun 2021. Vol 9 No 6 tahun 2022. 2149-2158

- Nugraha, F. (2018, December 6). Papua Nugini Tegaskan Kembali Papua Bagian Indonesia. Retrieved July 28, 2024, from Medcom.id: <https://www.medcom.id/internasional/asia/0Kvq969k-papua-nugini-tegaskan-kembali-papua-bagian-indonesia>.
- Oran R. Young and Marc A. Levy, *The Effectiveness of International Environmental Regimes*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1999.
- Permana, R. H. (2020, September 28). Lengkap, Ini Jawaban Tegas Silwany Pasaribu untuk Vanuatu di Sidang PBB. Retrieved July 27 2024, from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-5191778/lengkap-ini-jawaban-tegas-silwany-pasaribu-untuk-vanuatu-di-sidang-pbb/2>
- Putra, G. N., Legionosuko, T., & Majid, A. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Negara-Negara Anggota MSG Dalam Menghadapi Propaganda OPM: Studi Kasus Negara Republik Vanuatu. *Jurnal Peperangan Asimetris*, Agustus 2019, Volume 5, Nomor 2 , 42.
- Rahmi, N. (2015, September 3). Saudara Melanesia Indonesia. *Buletin Jendela Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*.
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun XI, No. 1 , 96-97.
- Sahlins, Marshall D. 1963. "Poor Man, Rich Man, Big-Man, Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia", in *Comparative Studies in Society and History* Vol. 5, No. 3. Cambridge University Press.
- Soloposnews, Sri Sumi Handayani 2022. <https://news.solopos.com/apa-itu-ras-melanesia-80-persen-penduduknya-di-dunia-ada-di-indonesia-1358286>. Diakses 18 juli 2024.

Steve Smith, Timothy Dunne, Amelia Hadfield. *Foreign Policy : Theories, Actors, Cases*. Third Edit. Oxford: Oxford University Press, 2016.

United Nations Development Programme. Diakses 26 Jul. 2024

Universitas Soedirman. (2020, July 20). Darmasiswa Testimony by Erika. Retrieved October 2, 2020, from Universitas Soedirman: <http://bipa.iro.unsoed.ac.id/2020/07/27/darmasiswa-testimony-by-erika/>

Wekke, I. S. *Studi Hubungan Internasional*.

Westminster Foundation for Democracy is an executive Non-departmental Public Body sponsored by the Foreign, Commonwealth & Development Office. Diakses 26 Jul. 2024

Wijaya, S., & Wayne, H. (2018, June 14). Bertambah Lagi Sekolah di Papua Nugini Ajarkan Bahasa Indonesia. Retrieved July 28, 2024 from ABC News: <https://www.abc.net.au/indonesian/2018-06-14/bertambah-lagi-sekolah-di-papua-nugini-ajarkan-bahasa-indonesia/9870480>

www.dpr.go.id. Diakses 13 jul. 24

Y. Guahk, dan I. Hernandez Pep "Parliamentary Diplomacy between the UE and the Republic of Korea. *Asia Europe Journal* (2023) 21:587–606

Lampiran 1. Chair's Summary Indonesia Pacific Parliamentary Partnership 2018

Draft As of 23 July 2018 13.16 REV

CHAIR'S SUMMARY INDONESIA PACIFIC PARLIAMENTARY PARTNERSHIP Jakarta, Indonesia, 23-24 July 2018

The Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) was held in Jakarta, Indonesia on 23-24 July 2018. The first-ever meeting of the House of the Representatives of the Republic of Indonesia and the parliaments of the Pacific countries aimed to strengthen cooperation and partnership among neighbours in the Pacific as we face common geographical and global challenges of this century. This cooperation and partnership is based on the principles of respecting the territorial integrity and sovereignty of States, as enshrined in the Charter of the United Nations.

The meeting of the Parliamentarians from the Republic of Indonesia, the Cook Islands, the Republic of Fiji, the Republic of Kiribati, the Republic of Marshall Islands, the Federated State of Micronesia, the Republic of Nauru, the Republic of Palau, the Independent State of Papua New Guinea, the Independent State of Samoa, the Solomon Islands, the Kingdom of Tonga, Tuvalu, French Polynesia (France), and New Caledonia (France) recognised the strong historic relations that the peoples possessed as well as the opportunity to deepen people to people relations.

The IPPP meeting dedicated their discussions to address three issues, namely i). Building Partnership for Future Development; ii). Parliamentary Drives to Promote Potential of Blue Economy to Ensure Sustainable Development of Marine Resources; and iii). Human Capital Development as a New Driving Force for Economic Growth in Indonesia-Pacific Partnership.

After constructive discussion, the participants of IPPP conveyed their common views as followed:

1. Reaffirmed their shared conviction on the importance of enhancing regional connectivity to boost the region's economic growth, promote cooperation and regional integration, while upholding the principle of non-interference in each other's internal affairs. Agreed to advance their economies, to boost trade between countries and unlock more economic opportunities through a strong link between businesses to further understand economic potential of the region.
2. They also recognized the various capacity building programs delivered by Indonesia to countries in the Pacific and welcomed Indonesia's commitment to increase support in terms of technical assistance and capacity building programs as part of inter-parliamentary cooperation.

Lampiran 2. Chair's Summary Indonesia Pacific Parliamentary Partnership 2018

Draft As of 23 July 2018 13.16 REV

3. Acknowledged the ocean as common identity, that is critical to the shared future and common humanity in all its diversity. They reaffirmed their commitment to conserve and the sustainable use of oceans, seas and marine resources for sustainable development as their global commons. They expressed concern with the marine pollution of all kinds, including marine debris, plastics and micro plastics, nutrient pollution, untreated wastewater and others, and further called for concerted actions that can reduce marine litter from land-based activities.
4. Were very alarmed by the adverse impact of climate change on the ocean, and towards the people in developing countries. They recognised the crucial importance of Paris Agreement adopted under the UN Framework Convention on Climate Change and urged all participants to take greater action in providing the necessary support to implement the agreement.
5. They also conveyed their grave concern on the increasing risks of overfishing and unsustainable use of natural resources despite worldwide efforts to promote sustainable fishing. Therefore, they shared their views that Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing needs to be deterred and eliminated to ensure the sustainability of the ocean.
6. Provided a particular focus to the development of women in the region; they appreciated progresses that have been made by Indonesia and Pacific Islands countries in terms of women representation in politics and decision making as well as the fulfilment and enjoyment of their rights. Further committed to promote actions to empower more women to be at the centre of development.
7. Reaffirmed the paramount importance of promoting quality education and health for the people and committed to allocating the necessary supports.

The Way Forward

8. We, the Parliamentarians, expressed our commitment for future engagements and agreed to explore new initiatives on inter-parliamentary cooperation programs, including through more technical assistance for parliamentary supports, workshop/seminars and other programs aimed to strengthen dialogue between Indonesia and Pacific Islands countries.
9. The Participants of IPPP conveyed their appreciation to the Indonesian House of Representatives for organising this historic event.

Jakarta, 23 July 2018 

Lampiran 3: Dokumentasi Penyelenggaraan IPPP tahun 2018



Lampiran 4 : Wawancara Dengan Ketua BKSAP DPR RI, Bpk Fadli Zon

